

**KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2016-2020**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Elsyie Mayshelly

No. Mahasiswa: 18312435

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

**KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Elsyé Mayshelly

No. Mahasiswa: 18312435

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

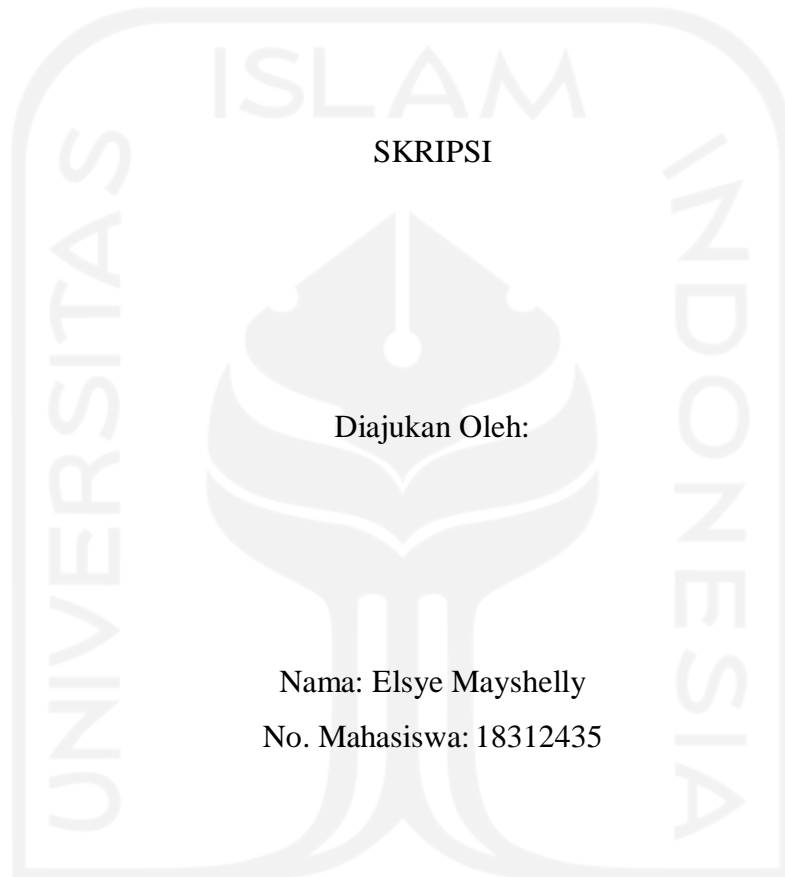
Yogyakarta, 8 Februari 2022

Penulis,



(Elsye Mayshelly)

**KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2016-2020**



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Elsy Mayshelly
No. Mahasiswa: 18312435

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal ...05/02/2022

Dosen Pembimbing,

(Rizki Hamdani, S.E., M.Ak., Ak., CA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Kinerja Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2016-2020**

Disusun oleh : ELSYE MAYSHELLY

Nomor Mahasiswa : 18312435

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 04 Maret 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Rizki Hamdani, SE., Ak., M.Ak.

Penguji : Reni Yendrawati, Dra., M.Si., CFra.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si



MOTTO

“...Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha

Melihat akan hamba-hambaNya”

(Q.S. Al Ghafir: 44)

“Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga”

(Imam Hasan Al-Bashri)

“Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai”

الجمعة المستدركة
الجمعة المستدركة
الجمعة المستدركة

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta,

Machmud Fauzi dan **Ambaryani, S.E.** yang telah mendoakan, memberikan inspirasi, kasih sayang, dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini bisa selesai dan lulus pada waktunya. Semoga skripsi ini menjadi awal yang baik

untuk langkah kedepannya.

Kakak yang saya sayangi,

Elfa Octavian, S.Stat.

Yang tiada hentinya memberikan semangat serta dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi.

Serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatku,

Yang menemani dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabill'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga penulis berkesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, adapun judul skripsi ini adalah **“Kinerja Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020”**.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Machmud Fauzi dan Ibu Ambaryani, S.E. selaku orang tua penulis yang tidak hentinya mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan dalam segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Diri saya sendiri, karena sudah berusaha yang terbaik, tidak pantang menyerah, dan berhasil melewati berbagai rintangan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

3. Kakak saya, Elfa Octavian, S. Stat. yang senantiasa memberikan doa dan dukungan selama menyelesaikan tugas akhir.
4. Bapak Rizki Hamdani S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, dukungan, kritik, saran, serta waktunya yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Jaka Sriyana., S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Mahmudi, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga.
9. Ibu Chodjidjah Makarim dan Bapak Wawas Bangun, selaku pemilik saluran *Youtube* yang kontennya berisi ilmu yang sangat berharga dan sangat berkontribusi dalam penulisan skripsi penulis.
10. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan *offline* maupun *online* dan seperjuangan penyusunan tugas akhir yaitu Aisyah, Anne, Yasmin, Wulan, Anita, Tania, dan Rahma yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan bantuan sejak awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-temanku tersayang Refita, Mey, Peni, Via, Dena, dan Irma yang sudah membantu penulis dalam berbagai aspek.
12. Teman-teman *Rumpi No Secret* khususnya dalam seperjuangan skripsi ini, yaitu Basil, Itsna, dan Silfia.
13. Akuntansi 18 serta teman-teman dan pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 7 Februari 2022

Penulis,

Elsye Mayshelly

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	ii
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi	Error! Bookmark not defined.
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Tabel.....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Gambar	Error! Bookmark not defined.
Daftar Lampiran.....	Error! Bookmark not defined.i
Abstrak	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Agensi	11
2.1.2 Teori Legitimasi.....	12
2.1.3 Alokasi Anggaran Daerah	14
2.1.4 Kapasitas Ekonomi	15
2.1.5 Tata Kelola Anggaran Daerah	16
2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
2.1.7 Kesejahteraan Masyarakat	18
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Hipotesis Penelitian	24
2.3.1 Pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Kapasitas Ekonomi.....	24

2.3.2 Pengaruh Kapasitas Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat	24
2.3.3 Pengaruh Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat	25
2.3.4 Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Populasi dan Sampel	28
3.2 Variabel Penelitian	29
3.2.1 Variabel Eksogen	29
3.2.2 Variabel Endogen	30
3.3 Metode Pengumpulan Data	30
3.4 Teknik Analisis Data	33
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	34
3.4.2 Penilaian Model Pengukuran Formatif (<i>Inner Model</i>)	35
3.4.3 Penilaian Model Struktural	35
3.4.4 Pengujian Hipotesis	35
3.5 Model Penelitian	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Data Penelitian	648
4.2 Analisis Deskriptif	654
4.3 Penilaian Model Pengukuran Formatif (<i>Inner Model</i>)	66
4.3.1 Uji Multikolinearitas	29
4.4 Penilaian Model Struktural (Uji Goodness of Fit)	66
4.5 Pengujian Hipotesis	51
4.6 Pembahasan Uji Hipotesis	56
4.6.1 Pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Kapasitas Ekonomi	56
4.6.2 Pengaruh Kapasitas Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat	57
4.6.3 Pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Kapasitas Ekonomi sebagai Variabel Intervening	59
4.6.4 Pengaruh Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat	60
4.6.5 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Keterbatasan Penelitian	65

5.3 Saran	66
5.4 Implikasi Hasil Penelitian	66
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	73



DAFTAR TABEL

1.1 Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota se-DIY.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu	22
4.1 PDRB atas Harga Konstan Kabupaten/Kota DIY	38
4.2 Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota DIY	39
4.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota DIY	40
4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota DIY	40
4.5 Rasio Efisiensi Belanja Pelayanan Umum Kabupaten/Kota DIY	41
4.6 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten/Kota DIY	42
4.7 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten/Kota DIY	43
4.8 Rasio SiLPA Kabupaten/Kota DIY	44
4.9 Hasil Statistik Deskriptif	45
4.10 Hasil Penilaian Uji Multikolinearitas	49
4.11 R-Square	50
4.12 Predictive Relevance	50
4.13 Hasil Uji Hipotesis (Direct Effects)	52
4.14 Hasil Uji Hipotesis (Indirect Effects).....	52

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Konseptual.....	27
3.1 Gambar Model Analisis dengan PLS	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Indikator Variabel Penelitian.....	73
Lampiran 2 <i>Path Diagram</i> Hipotesis Pertama dan Kedua.....	74
Lampiran 3 <i>Path Diagram</i> Hipotesis Ketiga.....	75
Lampiran 4 <i>Path Diagram</i> Hipotesis Keempat	76
Lampiran 5 Hasil Penelitian	77



ABSTRACT

In the last decade, DIY Province has experienced an increase in the quality of development and accelerated economic growth. However, the DIY Province Gini Ratio is still higher than the national numbers. Therefore, this study aims to examine the effect of budget allocation on economic capacity, and economic capacity, budgetary governance, and financial performance on the DIY public welfare. The research was conducted in DIY Province which consists of four regencies and one city. The data used in this study is secondary data originating from the website of BPS DIY Province and DJPK Ministry of Finance. The analytical method used is multiple regression analysis with the help of SmartPLS to examine and process data. Based on the results of hypothesis testing, it is known that budget allocation has a significant effect on economic capacity, and economic capacity, budgetary governance, and financial performance have a significant effect on people's welfare.

Keywords: *budget allocation, economic capacity, budget governance, financial performance, community welfare.*

ABSTRAK

Dalam satu dekade terakhir, Provinsi DIY mengalami peningkatan kualitas pembangunan dan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Namun, angka rasio gini Provinsi DIY masih lebih tinggi daripada angka nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh alokasi anggaran terhadap kapasitas ekonomi, dan kapasitas ekonomi, tata kelola anggaran, maupun kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat DIY. Penelitian dilakukan di Provinsi DIY yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari *website* BPS Provinsi DIY dan DJPK Kemenkeu. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan bantuan *SmartPLS* untuk memeriksa dan mengolah data. Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa alokasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kapasitas ekonomi, dan kapasitas ekonomi, tata kelola anggaran, maupun kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: alokasi anggaran, kapasitas ekonomi, tata kelola anggaran, kinerja keuangan, kesejahteraan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di Asia Tenggara bahkan di dunia. Menurut *Antara News* (2021), hingga saat ini jumlah pulau di Indonesia yang sudah tercatat oleh pemerintah menjadi 17.000 pulau, yaitu terdiri dari pulau-pulau berukuran besar maupun kecil. Bersumber pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mempunyai luas daratan sebesar 1,9 juta km². Selain itu, berdasarkan hasil sensus penduduk yang telah dilakukan, BPS mencatat total penduduk Indonesia sejumlah 270,2 juta jiwa per September 2020. Apabila dibandingkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk meningkat sebesar 32,56 juta jiwa. Dengan data jumlah penduduk dan luas daratan tersebut, dapat diketahui kepadatan penduduk Indonesia yakni sebesar 141 jiwa per km² (BPS, 2021b). Namun, hasil sensus penduduk 2020 juga memperlihatkan bahwa penduduk Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa berdasarkan sebaran per pulau (Setkab, 2021). Pulau Jawa menempati urutan ke-5 dari lima pulau besar yang ada di Indonesia menurut luas wilayahnya, tetapi mempunyai sebaran penduduk yang paling banyak, sedangkan Pulau Papua yang menjadi pulau terbesar di Indonesia, mempunyai sebaran penduduk yang paling sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum meratanya persebaran penduduk Indonesia yang dapat berdampak dalam bidang perekonomian, seperti tidak meratanya pendapatan, pembangunan, maupun kesejahteraan penduduk yang bisa mempengaruhi tingkat pengangguran serta pendapatan per kapita. Oleh karena itu, aspek pendidikan, kesehatan,

pendapatan, dan kesejahteraan penduduk harus diperhatikan betul oleh pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan kesejahteraan.

Masyarakat yang sejahtera merupakan tujuan dari setiap negara, karena menunjukkan kemakmuran di dalamnya. Negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar seperti Indonesia, dapat memberikan dampak positif maupun negatif atas pembangunan suatu wilayah di dalamnya. Dengan penduduk yang besar dan berkualitas baik, adalah jaminan terwujudnya pembangunan secara optimal. Akan tetapi, jika berkualitas rendah, akan menjadi beban pembangunan sekaligus tantangan dalam menggali potensi yang ada agar tercapainya pembangunan yang optimal. Parameter yang penting dalam keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia untuk kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Organisasi bernama United Nation Development Programme (UNDP) memperkenalkan IPM pada tahun 1990 dan mempublikasikannya dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) secara berkala (BPS, 2021c). IPM dapat didefinisikan sebagai suatu alat statistik yang digunakan oleh suatu negara untuk mengukur pencapaian aspek ekonomi maupun sosial secara keseluruhan. Kedua aspek tersebut didasarkan pada kesehatan masyarakat, tingkat pencapaian pendidikan, dan taraf hidup di dalamnya (Economic Times, 2016). IPM, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan secara signifikan dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat IPM dan rendahnya tingkat pengangguran serta kemiskinan mendasari tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Koefisien (*loading factor*) tertinggi menunjukkan jika indikator yang paling kuat untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat yaitu IPM (Habbe, 2021). Selain dapat menentukan tingkatan level pembangunan pada suatu wilayah, IPM juga menjadi ukuran kinerja bagaimana pemerintah mengalokasikan dana yang dianggarkan secara bijak dan seoptimal mungkin. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan, yaitu pembangunan menstimulasi pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempercepat dalam proses pembangunan. Dengan perekonomian yang baik, pendapatan per kapita pun akan naik dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Di dalam perekonomian khususnya daerah, ada beberapa unsur di dalamnya seperti kapasitas ekonomi, tata kelola anggaran daerah, kinerja keuangan daerah, dan lain-lain. Purbadharmaja et al. (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa efisiensi alokasi anggaran untuk pembiayaan pembangunan daerah dapat diatasi melalui tata kelola anggaran. Alokasi anggaran dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, memberikan dampak yang nyata bagi kebutuhan masyarakat seperti pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, perekonomian yang masih relatif rendah dapat ditingkatkan melalui peran masyarakat dalam kapasitas perekonomian daerah. Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata di setiap daerah salah satunya disebabkan oleh wilayah Indonesia yang begitu luas sehingga menimbulkan kesenjangan. Menurut Enny dalam Festiani (2015) belum meratanya pertumbuhan ekonomi karena ada ketimpangan dalam hal pembangunan yang masih terpusat di Jawa dan Sumatera.

Pembangunan manusia antar provinsi di Indonesia yang beragam menunjukkan ketimpangan pembangunan dalam berbagai sektor. Dalam data statistik 2013, indeks pembangunan yang bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya disebabkan oleh potensi sumber daya manusia dan keanekaragaman sumber daya alam. Keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program-program pembangunan juga menentukan tinggi rendahnya cakupan pembangunan manusia di suatu daerah (Wulandari et al., 2018). Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi masing-masing daerah berbeda, lebih-lebih perihal sumber pendapatan daerah. Perbedaan inilah yang akan menimbulkan alokasi anggaran dalam skala prioritas yang berbeda, karena masalah yang dihadapi setiap daerah pun akan berbeda. Jumlah penduduk yang terpusat dalam satu wilayah yang tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia berdampak pada buruknya kesenjangan pendapatan masyarakat di dalamnya. Harus ada peran serta maupun kemauan berbagai lapisan masyarakat yang didukung oleh pemerintah dalam mewujudkan *good governance* (Purbadharmaja et al., 2019).

Dalam upaya pemerataan ekonomi, hingga saat ini Pulau Jawa masih mencapai pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi yang paling besar yakni sebesar 58,75% atau lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan sisanya tersebar dalam lima wilayah lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua serta Bali dan Nusa Tenggara (Santoso, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa upaya dari pemerintah masih belum bisa untuk mengatasi permasalahan ketimpangan yang terjadi. Rakhman (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan salah satu faktor pembangunan masih terpusat di Pulau Jawa yakni

pusat pemerintahan serta ibu kota negara Indonesia yakni Jakarta terletak di Jawa. Bersamaan dengan itu, kota-kota besar yang terletak di Jawa juga lebih dilengkapi dengan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk perkembangan internasional. Tetapi, untuk kegiatan ekonomi terutama pertanian dan eksploitasi sumber daya alam, kota-kota kecil dan menengah jauh lebih cepat karena memainkan peran yang lebih signifikan (Firman, 2004). Namun sampai saat ini, pembangunan nasional terlalu terfokus di Pulau Jawa sehingga terjadi kesenjangan ekonomi maupun pembangunan diantara pulau-pulau lainnya.

Menurut data dari BPS dalam satu dekade terakhir, DKI Jakarta menempati urutan pertama Indeks Pembangunan Manusia menurut provinsi. Berdasarkan level IPM-nya, dari tahun 2010-2020 DKI Jakarta selalu mengalami kenaikan dan puncaknya pada tahun 2020 mencapai angka 80,77. Semenjak tahun 2017, status IPM DKI Jakarta berada dalam predikat “sangat tinggi” karena melebihi angka 80 dan melebihi rata-rata nasional sebesar 71,94. Capaian ini tidak terlepas bahwa sebagai ibu kota negara, wilayah DKI Jakarta juga berperan sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, maupun investasi. Di sisi lain, dalam satu dekade terakhir pula, kualitas pembangunan manusia Daerah Istimewa Yogyakarta semakin membaik yang ditandai dengan level IPM DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya dan berada pada peringkat ke-2 setelah DKI. Kendati demikian, pada tahun 2020 IPM DIY berada pada level 79,97 yaitu berkurang 0,02 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dengan level tersebut, DIY memperoleh status IPM dengan predikat tinggi (BPS, 2021a).

Penurunan IPM DIY ini merupakan yang pertama dalam kurun waktu 10 tahun belakang. Kepala BPS DIY Heru Margono mengatakan kepada Parwanto (2021) bahwa indikator pengeluaran per kapita per tahun yang turun di tahun 2020 mengalami kontraksi *minus* 2,63 persen akibat pandemi Covid-19. Namun, secara keseluruhan dari tahun 2010 hingga 2020 rata-rata IPM DIY mengalami kenaikan 0,59 persen per tahunnya dan rata-rata pengeluaran per kapita di DIY mengalami pertumbuhan 1,5 persen per tahun. Apabila IPM DIY dilihat menurut data per kabupaten atau kota, IPM kota Yogyakarta berada pada poin 86,61 (sangat tinggi), Kabupaten Sleman 83,84 (sangat tinggi), Kabupaten Bantul 80,01 (sangat tinggi), Kabupaten Kulonprogo 74,46 (tinggi) dan Gunungkidul 69,98 (sedang).

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota se-DIY, tahun 2015-2019 dalam persen

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	4,62	4,76	5,97	10,84	13,49
Bantul	4,97	5,05	5,10	5,47	5,53
Gunungkidul	4,82	4,88	5,01	5,16	5,33
Sleman	5,18	5,22	5,34	6,42	6,49
Yogyakarta	5,09	5,11	5,24	5,49	5,96
D.I.Yogyakarta	4,95	5,05	5,26	6,20	6,60

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Kerjasama BPS DIY dan Bappeda DIY (2020) dalam Buku Analisis Ketimpangan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 diungkapkan pertumbuhan ekonomi DIY menunjukkan percepatan selama lima tahun terakhir. Laju pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2016 tercatat sebesar 5,05 persen dengan sedikit kenaikan dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 4,95 persen, kemudian pada tahun 2017 bertambah menjadi 5,26 persen, lalu di tahun 2018 mengalami

peningkatan yang cukup signifikan sebesar 6,20 persen dan mencapai 6,60 persen pada tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi DIY periode 2015-2019 juga lebih tinggi dari angka nasional, yaitu pada tahun 2015 sampai 2017 berada sedikit di atasnya sedangkan tahun 2018 dan 2019 selisih 1 hingga 1,5 persen lebih tinggi dari angka nasional. Laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kegiatan ekonomi diyakini akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan.

Selanjutnya dalam lima tahun terakhir, penduduk miskin Yogyakarta menurun sebesar 101,76 ribu jiwa dengan penurunan tertinggi tercatat pada periode 2015-2016 sebesar 10,05 persen atau setara dengan 55,29 ribu jiwa. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir itu pula, jumlah penduduk miskin secara rata-rata turun sebesar 25,44 ribu orang per tahun. Selama 2015 sampai 2019, angka rasio gini DIY lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia dan sejak tahun 2017 angka rasio gini DIY merupakan yang tertinggi di Indonesia. Rasio gini merupakan ukuran kesenjangan pendapatan dan kekayaan, sehingga rasio gini yang relatif tinggi di DIY mengindikasikan bahwa ketimpangan masih tinggi di wilayah tersebut. Kondisi yang terjadi juga menunjukkan bahwa belum meratanya hasil pembangunan belum bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat DIY.

Berdasarkan berbagai paparan tersebut, penulis ingin meninjau lebih lanjut mengenai peran perekonomian daerah serta kinerja keuangan pemerintah daerah dalam keberlangsungan kesejahteraan masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membuat penelitian yang berjudul **“Kinerja Perekonomian**

Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh alokasi anggaran terhadap kapasitas ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh kapasitas ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh alokasi anggaran terhadap kapasitas ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kapasitas ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2016-2020.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, yaitu dapat mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan serta dapat memahami aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Yogyakarta pada tahun 2016-2020 dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran.
2. Bagi institusi pendidikan, yaitu agar dapat dimanfaatkan sebagai tambahan literatur pembelajaran bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian mengenai kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.
3. Bagi institusi pemerintahan, yaitu agar dapat digunakan sebagai evaluasi maupun pertimbangan dalam pengambilan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk memajukan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dari aspek ekonomi.
4. Bagi masyarakat, yaitu agar dapat meningkatkan informasi dan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan berisi arti penting penelitian dan paparan masalah yang dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bagian kajian pustaka memaparkan alasan teoritis atas penelitian yang dilakukan yang dituangkan dalam landasan teori, telaah penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat metode yang berkaitan dengan data dan metode yang berkaitan dengan analisis yang dituangkan dalam populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang data penelitian, hasil dari penelitian tersebut, dan analisis hasil penelitian.

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini, analisis yang sudah dilakukan pada bagian sebelumnya akan menghasilkan kesimpulan dan akan ada jawaban dari pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah, serta berisi saran yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) mengemukakan kontrak antara satu orang atau lebih yang berperan sebagai prinsipal dengan orang lain yang bertindak sebagai agen dalam melakukan berbagai layanan dapat didefinisikan sebagai hubungan keagenan. Apabila hubungan kerja antara kedua pihak tersebut lebih mengarah pada kepentingan mereka sendiri, akan menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan ini dapat terjadi ketika agen melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan biaya dikekang oleh prinsipal yang mempunyai tugas pemantauan di dalam organisasi. Selain itu, pelimpahan wewenang yang terjadi dari pemilik kepada pengelola dapat menimbulkan masalah yang disebabkan oleh ketidakselarasan kepentingan dalam suatu organisasi. Pada akhirnya, teori agensi akan berkisar pada masalah keagenan serta solusinya. Untuk mengurangi masalah di dalam perusahaan, teori agensi memprioritaskan pemisahan antara pemilik atau prinsipal dengan manajer atau agen (Panda & Leepsa, 2017).

Sejak otonomi daerah mulai berlaku di Indonesia, sudut pandang teori keagenan dapat ditempatkan dalam lingkup lembaga sektor publik yang bersumber pada UU nomor 22/1999 mengenai Pemerintahan Daerah tahun 2001. Di dalamnya, hubungan prinsipal dengan agen yaitu seperti hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah berperan sebagai agen dan masyarakat berperan sebagai prinsipal yang digambarkan ketika prinsipal memberikan kewenangan dan

sumberdaya kepada agen seperti dalam bentuk memilih seseorang yang berhak mengatur anggaran seperti APBN maupun APBD. Kemudian agen akan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada prinsipal sebagai bentuk tanggung jawab atas wewenang yang diberikan. Karena prinsipal tidak mengetahui secara langsung apa saja yang telah dilakukan oleh agen dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan pihak independen yang akan memastikan bahwa yang dilakukan oleh agen adalah benar. Oleh sebab itu, dalam hal ini dibutuhkan peran akuntan sektor publik yang akan menjadi pihak independen mengingat bahwa sebagian laporan yang diberikan oleh agen (pemerintah) adalah informasi keuangan (Abdullah & Halim, 2006a; Santoso & Pambelum, 2008).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dawson et al. (2016) menunjukkan bahwa meskipun diperlukan pemahaman dari berbagai pihak, teori agensi dapat diterapkan pada sektor publik. Kekurangannya adalah di dalam sektor publik lebih fokus pada distribusi sumber daya negara dan kurang fokus pada aspek pengendalian pemerintahan yang disebabkan tidak adanya dewan direksi. Menimbang pada luasnya layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, perubahan yang demikian dapat berdampak besar pada kualitas kehidupan masyarakat.

2.1.2 Teori Legitimasi

Dowling & Pfeffer (1975) mengemukakan bahwa teori legitimasi didasarkan oleh perikatan sosial antara perusahaan atau organisasi dan masyarakat dengan menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi organisasi dapat terancam apabila terjadi perbedaan antara nilai pada organisasi dengan nilai sosial di

masyarakat. Kemampuan organisasi dalam melanjutkan kegiatannya pun dapat dipengaruhi karena perbedaan tersebut. Perbedaan inilah yang dinamakan *legitimacy gap*. Seperti organisasi yang mengalami adaptasi, legitimasi adalah kendala, namun merupakan kendala yang dinamis. Dowling & Pfeffer (1975) juga menyebutkan bahwa dalam menjalankan aktivitas organisasi dan memperoleh dukungan dari aktivitas tersebut, harus sesuai dengan norma sosial lingkungan sehingga harapan masyarakat dapat terpenuhi.

Menurut pendapat Hybels (1995) teori legitimasi dikembangkan untuk memperkirakan perilaku sosial yang terjadi di dalam organisasi serta fenomena sosial yang mungkin dapat diamati, seperti pengamatan terhadap sistem pemerintahan yang demokratis, di mana warga negara diberikan hak dan kebebasan dalam memilih pemimpin mereka. Tindakan warga negara tersebut mengindikasikan dukungan terhadap nilai dan normal sosial. Dalam hal ini, legitimasi sebagai representasi simbolis dari evaluasi suatu organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah seperti mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah dapat didukung dengan teori legitimasi. Apabila pemerintah memiliki kinerja yang baik, akan memberikan hasil yang memuaskan dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Sejalan dengan meningkatnya kualitas pekerjaan, pengawasan internal pun akan meningkat, sehingga dibutuhkan pihak independen seperti auditor dalam memberikan legitimasi atas kinerja tersebut. Pengawasan internal didukung teori legitimasi untuk melihat pengaruh pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Apabila pada akhirnya kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,

mengindikasikan bahwa pemerintah telah berhasil melaksanakan legitimasi tersebut. Dengan teori ini, legitimasi masyarakat terhadap pemerintah menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan pemerintah ke depan karena harapan dari masyarakat bahwa pengelolaan keuangan merupakan salah satu bentuk yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat berjalan secara sesuai. Legitimasi tidak dapat dilepaskan dari pantauan masyarakat lantaran hal itu adalah tempat di mana pemerintah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Pemerintah akan mengurangi rasa tidak percaya dan timbulnya penyimpangan serta mampu menciptakan keadilan serta keseimbangan dalam masyarakat (Novitasari & Prabowo, 2020).

2.1.3 Alokasi Anggaran Daerah

Atkinson et al. (1997) mendefinisikan bahwa anggaran adalah ungkapan kuantitatif dari arus masuk dan keluarnya uang yang menentukan apakah rencana keuangan dari suatu organisasi akan terpenuhi tujuannya. Sebelum periode anggaran, rencana kebijakan anggaran sudah harus dipersiapkan untuk bisnis secara keseluruhan sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi, anggaran adalah alat yang vital. Secara nyata, satu tahun sebelumnya perusahaan bisnis maupun warga negara menunggu anggaran pemerintah sebelum mereka menyiapkan anggaran untuk mereka sendiri (Mieseigha & Adeniyi, 2013).

Menurut Abdullah & Halim (2006b) hasil atau kinerja yang akan dicapai berdasarkan pendekatan dalam alokasi sumber daya disebut anggaran berbasis kinerja, yaitu kinerja yang menjadi penyelesaian permasalahan maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di dalam pemerintahan, anggaran yang berlaku di Negara

Indonesia yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berdasar atas peraturan resmi yang dikenal sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Dalam penelitian ini, indikator alokasi anggaran yang digunakan terkait fungsi pelayanan publik secara umum terdiri dari belanja modal atau pembangunan, belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan yang diperuntukkan serta didistribusikan dalam pembiayaan kegiatan yang hasil, manfaat, serta dampaknya dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, alokasi infrastruktur yang baik dan merata akan mempermudah akses pembangunan yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Dari peningkatan alokasi anggaran di berbagai bidang tersebut diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan publik (Purbadharmaja et al., 2019).

2.1.4 Kapasitas Ekonomi

Peningkatan kapasitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa dari satu periode dibandingkan periode lainnya dapat dilihat sebagai indikator pertumbuhan ekonomi (Raisová & Júlia, 2014). Sama halnya dengan pendapat Hernández & Munoz (2017) akumulasi modal dan tingkat pertumbuhan kapasitas ekonomi berperan dalam penentuan pertumbuhan ekonomi endogen secara alami. Oleh sebab itu, cakupan kapasitas ekonomi tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga pembangunan dalam bidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi dapat diterangkan sebagai suatu proses yang menyebabkan meningkatnya pendapatan per kapita suatu masyarakat. Kebijakan pembangunan ekonomi dapat dilihat secara nyata dalam pertumbuhan ekonomi.

Selain menjadikan pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi, indikator lain yang dapat diraih dan diwujudkan dari beraneka ragam sektor ekonomi yaitu perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode waktu yang berbeda (Hanum & Sarlia, 2019).

Pengguna akhir yang bertujuan untuk membeli barang dan jasa dibuat di suatu negara dalam kurun waktu tertentu diukur dengan PDRB. Barang dan jasa tersebut mempunyai nilai yang disebut nilai moneter barang dan jasa akhir. PDRB dianggap penting karena memberikan informasi mengenai ukuran ekonomi maupun kinerja ekonomi. Tanda bahwa perekonomian berjalan dengan baik menginterpretasikan peningkatan PDRB. Peningkatan PDRB dari tahun ke tahun dapat berakibat secara langsung terhadap pendapatan per kapita masyarakat dalam suatu wilayah. Pendapatan per kapita yang meningkat pun mendorong daya beli masyarakat atas barang dan jasa (Callen, 2017).

2.1.5 Tata Kelola Anggaran Daerah

Tata kelola anggaran mencakup struktur, proses, dan hukum yang diimplementasikan untuk memastikan apabila sistem penganggaran yang ditetapkan secara berkelanjutan dapat memenuhi tujuannya. Salah satu landasan yang penting untuk membangun kepercayaan antara negara maupun warga negara di dalamnya adalah menggunakan penganggaran. Di dalam sektor publik, untuk memastikan bahwa alokasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah berada dalam batas yang ditentukan, dicerminkan melalui anggaran, karena pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara bergantung pada implementasi anggaran yang efektif (Hackbart & Ramsey, 2002; Otalor & Oti, 2020).

Dalam aspek akuntabilitas, untuk mengatasi efisiensi alokasi anggaran dalam pembiayaan pembangunan daerah dapat menggunakan tata kelola anggaran. Tingkat penyerapan anggaran dalam pembangunan ditunjukkan dengan indikator SiLPA. Daerah dengan SiLPA yang tinggi menunjukkan tidak optimalnya alokasi anggaran dan mengindikasikan perubahan regulasi atau inkonsistensi regulasi terkait penggunaan APBD (Purbadharmaja et al., 2019). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi target pendapatan dengan pengeluaran aktual anggaran selama satu periode anggaran. Alokasi anggaran yang optimal ditunjukkan dengan SiLPA yang rendah, yang berarti efektif dalam mengalokasikan anggaran (Dian, 2017).

2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Egbunike & Okerekeoti (2018) menyatakan bahwa kinerja keuangan mengacu pada kemampuan perusahaan dalam mencapai hasil keuangan yang dirancang dan diukur terhadap *output* yang diinginkan. Pencapaian keuangan tersebut meliputi pengumpulan dan alokasi keuangan selama periode tertentu, sedangkan definisi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu suatu hasil yang diraih selama satu periode anggaran dalam aspek keuangan daerah, yakni mencakup pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang diatur dalam perundang-undangan (Sino et al., 2016).

Kinerja pemerintah daerah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan dan digunakan untuk memberikan informasi bagaimana penyusunan kebijakan yang positif bagi masyarakat. Derajat desentralisasi dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan sebagai indikator rasio keuangan

dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah. Rasio derajat desentralisasi mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan seberapa besar peran PAD dalam pengelolaan desentralisasi karena rasio ini memperlihatkan bagaimana hubungan total penerimaan atau pendapatan daerah dengan derajat kontribusi PAD (Mahmudi, 2019). Sementara itu, tingkat pencapaian pemerintah daerah dalam melangsungkan suatu aktivitas dapat dibandingkan melalui pendapatan sebenarnya dengan pendapatan anggaran yang disebut dengan rasio efektivitas PAD (Habbe, 2021). Siregar (2017) mengungkapkan bahwa PAD diperoleh dari retribusi, pajak, dan kekayaan daerah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta sumber lain yang sah dan merupakan bagian dari pendapatan pemerintah daerah. Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat dalam pembayaran retribusi dan pajak daerah dapat ditunjukkan dengan rasio derajat desentralisasi, yang dapat digambarkan apabila semakin tinggi rasio derajat desentralisasi, maka semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Suranta et al., 2017).

2.1.7 Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu parameter kinerja pembangunan di suatu daerah ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang berkualitas salah satunya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan serta tingkat pengangguran, pendapatan secara merata, dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai alat peningkatan kesejahteraan sosial. Untuk itu diharapkan bahwa setiap kebijakan ekonomi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan

masyarakat yang meningkat sejalan dengan pencapaian hasil-hasil pembangunan ekonomi (BPS DIY & Bappeda DIY, 2020).

United Nations Development Programme (UNDP) melakukan operasionalisasi pengukuran kesejahteraan dalam *Human Development Report* (HDR). Pengukuran yang dikembangkan yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk dengan tiga ukuran dasar, yang pertama umur panjang serta hidup sehat diukur dengan angka harapan hidup, kedua adalah pengetahuan diukur dengan literasi, yang terakhir yaitu standar hidup yang layak diukur dengan pendapatan per kapita yang sejalan dengan daya beli masyarakat (BPS, 2021c).

Secara signifikan indikator IPM, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan mengukur kesejahteraan masyarakat dengan tanda positif (IPM) dan tanda negatif (pengangguran dan kemiskinan). Hal ini bermakna apabila tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi didasari oleh tingginya tingkat IPM dan rendahnya tingkat pengangguran dan kemiskinan (Habbe, 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Menurut Sofilda et al. (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Government Spending Contributions on per Capita Income and its Effect toward the Human Development Index* mengkaji peningkatan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan IPM tahun 2007-2012 yang dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Hasil regresi berganda dengan data panel menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita dipengaruhi secara signifikan oleh pengeluaran barang dan jasa, dan IPM di wilayah Indonesia bagian barat, timur, dan tengah dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan per kapita.

Sementara itu, peningkatan pendapatan per kapita dipengaruhi secara signifikan oleh belanja modal, barang, dan jasa,

Penelitian yang ditulis oleh Adiputra et al. (2017) berjudul Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening bertujuan untuk mengetahui PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja modal. Hasil penelitian dengan menggunakan metode *purposive sampling* menunjukkan kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Bali dipengaruhi secara langsung oleh PAD dan dapat ditingkatkan dengan SiLPA melalui alokasi belanja modal.

Indramawan (2018) di dalam penelitiannya mengenai *Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua* membahas Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota Provinsi Papua dan Papua Barat dipengaruhi oleh kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) kesimpulan penelitian ini bahwa IPM mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal, tetapi mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap belanja modal, serta mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap rasio efektivitas PAD.

Selanjutnya, penelitian yang berjudul *The Effect of Regional Own-source Revenue, Tax Revenue-sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to the Human Development Index* (Mutiha, 2018) bertujuan untuk menguji apakah IPM provinsi di Indonesia tahun 2013-2015 dipengaruhi oleh PAD,

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, DAU, dan DAK. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan IPM mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap PAD dan mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap DBH Pajak, DAU, dan DAK. Hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan PAD mampu meningkatkan IPM sedangkan peningkatan DBH Pajak, DAU, dan DAK akan menurunkan IPM.

Kemudian terdapat penelitian yang berjudul *The Implications of Fiscal Decentralization and Budget Governance on Economic Capacity and Community Welfare* oleh Purbadharmaja et al. (2019) yaitu menyelidiki hubungan antara masyarakat dan pemerintah Bali dalam desentralisasi pajak melalui penganggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali periode 2012-2016 tampaknya tidak signifikan. Hasil yang didapat dengan menggunakan analisis *Partial Least Squares* (PLS) yaitu desentralisasi fiskal secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi mendorong perekonomian bagi peningkatan kapasitas ekonomi daerah. Indikator pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dalam alokasi anggaran sejalan dengan peningkatan kapasitas ekonomi, dan kapasitas ekonomi akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pengelolaan APBD juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian lainnya berjudul *Government Expenditure and Poverty Reduction in the Proliferation of New Administrative Areas of Central Kalimantan, Indonesia* (Elia et al., 2020) menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan terkait kegiatan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap

belanja pemerintah dan berdampak pada pengeluaran pemerintah melalui penyediaan lapangan kerja dan PDRB di delapan kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah.

Terdapat penelitian berjudul *The Exploration of Effect of Financial Performance to The Public Welfare* (Habbe, 2021). Penelitian ini menguji apakah tingkat kesejahteraan di 25 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan periode 2009-2014 dipengaruhi oleh kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan analisis menggunakan deskriptif dan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis PLS menunjukkan bahwa kinerja otonomi daerah mampu meningkatkan IPM selama satu tahun ke depan dan menurunkan angka kemiskinan dalam dua dan tiga tahun ke depan. Dalam dua atau tiga tahun ke depan, efektivitas PAD dapat menurunkan tingkat pengangguran tetapi gagal meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan.

Berbagai penelitian terdahulu dirangkum melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Nama Peneliti	Hasil
1.	<i>Government Spending Contributions on per Capita Income and its Effect toward the Human Development Index</i> (Sofilda et al., 2015)	Peningkatan pendapatan per kapita dipengaruhi secara signifikan oleh pengeluaran barang dan jasa, dan IPM di wilayah Indonesia bagian barat, timur, dan tengah dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan per kapita. Sementara itu, peningkatan pendapatan per kapita dipengaruhi secara signifikan oleh belanja modal, barang, dan jasa,
2.	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Adiputra et al., 2017)	Kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Bali dipengaruhi secara langsung oleh PAD dan dapat ditingkatkan dengan SiLPA melalui alokasi belanja modal.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No.	Judul dan Nama Peneliti	Hasil
3.	<i>Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua</i> (Indramawan, 2018)	IPM mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal, tetapi mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap belanja modal, serta mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap rasio efektivitas PAD.
4.	<i>The Effect of Regional Own-source Revenue, Tax Revenue-sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to the Human Development Index</i> (Mutuha, 2018)	IPM mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap PAD dan mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap DBH Pajak, DAU, dan DAK. Hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan PAD mampu meningkatkan IPM sedangkan peningkatan DBH Pajak, DAU, dan DAK akan menurunkan IPM.
5.	<i>The Implications of Fiscal Decentralization and Budget Governance on Economic Capacity and Community Welfare</i> (Purbadharmaja et al., 2019)	Desentralisasi fiskal secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi mendorong perekonomian bagi peningkatan kapasitas ekonomi daerah. Indikator pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dalam alokasi anggaran sejalan dengan peningkatan kapasitas ekonomi, dan kapasitas ekonomi akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pengelolaan APBD juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6.	<i>Government Expenditure and Poverty Reduction in the Proliferation of New Administrative Areas of Central Kalimantan, Indonesia</i> (Elia et al., 2020)	Kemiskinan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap belanja pemerintah dan berdampak pada pengeluaran pemerintah melalui penyediaan lapangan kerja dan PDRB di delapan kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah.
7.	<i>The Exploration of Effect of Financial Performance to The Public Welfare</i> (Habbe, 2021)	Kinerja otonomi daerah mampu meningkatkan IPM selama satu tahun ke depan dan menurunkan angka kemiskinan dalam dua dan tiga tahun ke depan. Kemudian, dalam dua atau tiga tahun ke depan, efektivitas PAD dapat menurunkan tingkat pengangguran tetapi gagal meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Kapasitas Ekonomi

Masyarakat, yang berperan sebagai individu sangat membutuhkan pelayanan publik yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Dengan peningkatan alokasi anggaran di berbagai bidang, diharapkan akan mendorong perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, indikator yang dianggap penting yaitu PDRB, karena dapat memberikan informasi mengenai ukuran maupun kinerja ekonomi, Kinerja ekonomi yang baik secara nyata mengalokasikan infrastruktur yang merata sehingga mempermudah akses kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Purbadharmaja et al. (2019) bahwa kapasitas perekonomian di Provinsi Bali dapat ditingkatkan melalui alokasi anggaran dalam bidang pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Kemudian tingkat PDRB di Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan ekonomi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mendorong peningkatan pendapatan per kapita (Elia et al., 2020). Oleh karena itu, atas dasar paparan ini dapat disajikan hipotesis sebagai berikut:

H1: Alokasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kapasitas ekonomi

2.3.2 Pengaruh Kapasitas Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Penelitian oleh Purbadharmaja et al. (2019) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mempunyai keterkaitan dengan kapasitas ekonomi. Peningkatan kapasitas ekonomi akan mendorong sektor swasta untuk berinvestasi di daerah sehingga pendapatan pun akan meningkat. Kesejahteraan ekonomi

masyarakat yang mengalami perbaikan mencerminkan kenaikan pendapatan per kapita (Hanum & Sarlia, 2019). Di dalam penelitian Sofilda et al. (2015) menyatakan pertumbuhan pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap IPM di wilayah Indonesia bagian barat. Sementara penelitian lainnya menunjukkan bahwa kemiskinan berdampak pada PDRB (Elia et al., 2020). Oleh karena itu, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2a: PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap IPM

H2b: PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan

H2c: PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran

2.3.3 Pengaruh Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Indikator SILPA maupun SiLPA digunakan sebagai indikator tata kelola anggaran, karena alokasi anggaran dengan SILPA rendah berarti efektif dalam mengalokasikan anggaran (Dian, 2017). Menurut Adiputra et al. (2017) kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Bali dapat ditingkatkan dengan SiLPA melalui alokasi belanja modal.

Dalam membangun kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan pengelolaan anggaran yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan karena dibutuhkan dana dalam melakukan berbagai program pembangunan. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh kabupaten/kota di Provinsi Bali (Purbadharmaja et al., 2019). Dengan paparan tersebut, hipotesis yang dapat diproyeksikan sebagai berikut:

H3a: SiLPA berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM

H3b: SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan

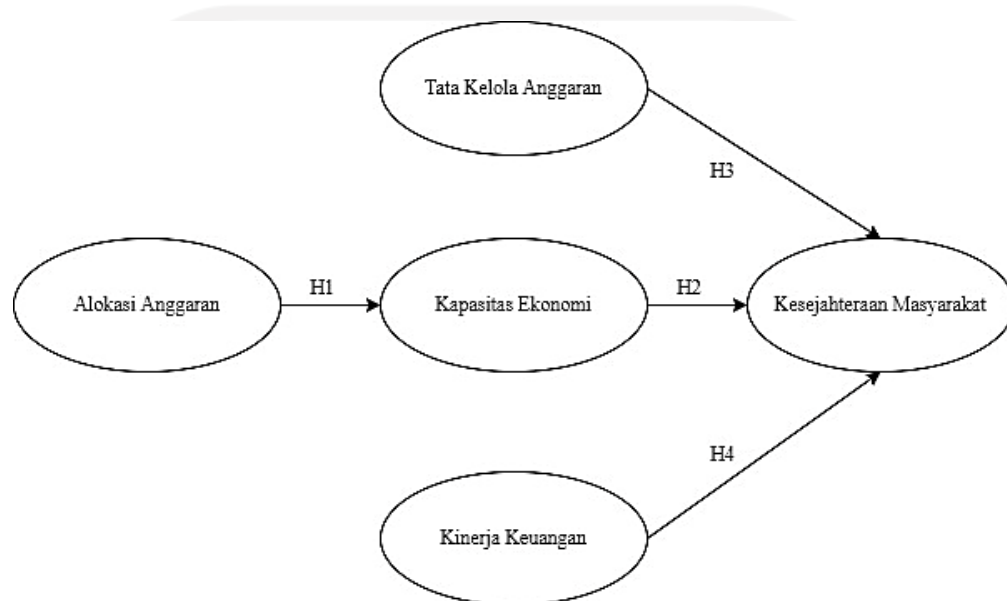
H3c: SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran**2.3.4 Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan indikator derajat desentralisasi dan efektivitas PAD. Mutiha (2018) mengemukakan bahwa IPM mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap PAD, yang berarti peningkatan PAD mampu meningkatkan IPM provinsi di Indonesia. Kemudian penelitian pada wilayah Papua dan Papua Barat menunjukkan IPM mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal, tetapi mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap rasio efektivitas PAD (Indramawan, 2018). Sementara itu, penelitian lainnya menunjukkan kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Bali dipengaruhi secara langsung oleh PAD (Adiputra et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Habbe (2021) menyatakan dalam dua atau tiga tahun ke depan, efektivitas PAD dapat menurunkan tingkat pengangguran tetapi gagal meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan di 25 kota/kabupaten di Sulawesi Selatan tahun 2009-2014. Akibatnya, hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H4a: Derajat desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM**H4b: Derajat desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan****H4c: Derajat desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran****H4d: Efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM**

H4e: Efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan

H4f: Efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Menurut istilah di dalam statistik, makna dari populasi adalah kumpulan dari individu, unit, atau objek di mana sampel dapat diambil dan akan diselidiki untuk mendapatkan hasil dari analisis yang diterapkan (Scott & Marshall, 2009). Sementara itu, pengertian sampel menurut Kazerooni (2001) yaitu himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi dan akan digunakan dalam penelitian karena seringkali setiap anggota populasi penelitian tidak dapat diukur.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota tahun anggaran 2016-2020. Lokasi ini dipilih karena dalam satu dekade terakhir, DIY mempunyai kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik yaitu ditandai dengan level IPM DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya dan berada pada posisi ke-2 setelah ibu kota Negara Indonesia, yaitu DKI Jakarta (BPS, 2021a). Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi DIY periode 2015-2019 menunjukkan percepatan dan juga lebih tinggi dari angka nasional. Tetapi dalam periode itu pula, angka rasio gini DIY lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia dan sejak tahun 2017 angka rasio gini DIY merupakan yang tertinggi di Indonesia (BPS DIY & Bappeda DIY, 2020). Kemudian, sampel penelitian berupa publikasi Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan PDRB per kabupaten/kota di DIY menurut pengeluaran serta data laporan keuangan daerah yaitu mencakup APBD dan Laporan Realisasi Anggaran.

3.2 Variabel Penelitian

Dalam prosesnya, penelitian memerlukan pertimbangan faktor terukur yang dapat berubah karena keadaan, faktor-faktor inilah yang disebut variabel (Oyebanji, 2017). Menurut Nwankwo & Emunemu (2014), variabel adalah nama yang diberikan pada varian yang ingin dijelaskan dan mempunyai peran yang sangat penting di dalam penelitian karena dapat digunakan untuk menentukan sifat dan arah penelitian. Variabel adalah dasar dan bahan utama dari sebuah karya penelitian, variabel dapat bervariasi atau berubah nilainya sesuai dengan cara memperlakukan atau situasinya. Adegun (2005) mengatakan pada umumnya penelitian dalam pendidikan berfokus pada pembentukan hubungan timbal balik antar variabel, dan setiap aspek penelitian memerlukan bahan dasar serta karakteristik, yaitu yang disebut variabel penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan model analisis yang digunakan, meliputi dua jenis variabel, yaitu variabel eksogen atau independen (X) dan variabel endogen atau dependen (Y) yang akan diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Variabel Eksogen

Variabel eksogen atau independen, dan dapat juga disebut variabel bebas adalah variabel yang (mungkin) menyebabkan dan mempengaruhi variabel lain dalam hasil penelitian (Creswell, 2014).

Penelitian ini menyertakan empat variabel eksogen yaitu sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran (X_1) dengan indikator:
 - X_1 Rasio belanja fungsi pelayanan umum.
2. Kapasitas ekonomi (X_2) dengan indikator:

- X_2 Tingkat PDRB Riil.
3. Tata kelola anggaran (X_3) dengan indikator:
- X_3 Rasio SiLPA.
4. Kinerja keuangan daerah (X_4) dengan dua indikator:
- $X_{4,1}$ Rasio derajat desentralisasi; dan
 - $X_{4,2}$ Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

3.2.2 Variabel Endogen

Variabel endogen atau dependen, dan dapat juga disebut variabel terikat adalah hasil dari pengaruh yang diakibatkan oleh variabel eksogen dan bergantung pada variabel bebas (Creswell, 2014).

Penelitian ini menyertakan satu variabel endogen yaitu sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat (Y_1) dengan tiga indikator:
- $Y_{1,1}$ Indeks Pembangunan Manusia;
 - $Y_{1,2}$ Tingkat kemiskinan; dan
 - $Y_{1,3}$ Tingkat Pengangguran Terbuka.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode kuantitatif adalah metode yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini, yakni prosedur pengumpulan, analisis, penafsiran, dan penulisan data dari suatu penelitian yang menjadi bagian dari proses pengidentifikasian sampel serta populasi. Penelitian kuantitatif merupakan suatu bentuk pendekatan dalam menguji teori-teori objektif dengan mengkaji hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini dapat diukur dan dianalisis menggunakan prosedur statistik (Creswell, 2014).

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh instansi-instansi terkait untuk tujuan tertentu tetapi sangat berguna dalam rangka tujuan penelitian. Data dikumpulkan dalam rentang waktu tahun anggaran 2016-2020 dan diperoleh dari sumber yang relevan yaitu instansi terkait melalui *website* dan dokumentasi lainnya meliputi berita acara maupun publikasi.

Data PDRB, IPM, tingkat kemiskinan, serta pengangguran tidak dihitung secara manual karena tersedia di *website* Badan Pusat Statistik. Tingkat PDRB riil berasal dari *website* BPS masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY melalui publikasi Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran pada Tabel PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dalam satuan miliar rupiah. PDRB atas dasar harga konstan dipilih karena digunakan sebagai dasar perhitungan nilai tambah barang dan jasa pada suatu tahun tertentu, juga dapat berperan dalam mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah dalam satu periode ke periode berikutnya (BPS DIY, 2021). Selanjutnya, informasi IPM terletak pada komponen sosial dan kependudukan dalam Tabel [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia, kemudian tingkat kemiskinan terletak pada komponen kemiskinan dan ketimpangan dalam Tabel Persentase Penduduk Miskin menurut kabupaten/kota, dan tingkat pengangguran terletak pada komponen tenaga kerja dalam Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten/kota yang masing-masing data tersebut diperoleh dari *website* BPS Provinsi DIY (<https://yogyakarta.bps.go.id>).

Data rasio belanja fungsi pelayanan umum didapat dari data anggaran (target) dan realisasi belanja per fungsi, kemudian rasio SiLPA, derajat

desentralisasi, dan efektivitas PAD didapat dari ringkasan data anggaran dan realisasi bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, total pendapatan daerah, serta Pendapatan Asli Daerah yang keseluruhannya berasal dari laporan keuangan daerah yang terdapat pada situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id) di mana hasil data tersebut telah melalui proses perhitungan manual, yang formulasinya akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019)

4. Rasio Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

$$= \frac{\text{Realisasi SiLPA}}{\text{Anggaran SiLPA}} \times 100\%$$

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Partial Least Square* (PLS). Indikator reflektif dan formatif digunakan PLS dalam menganalisis variabel laten yang tidak dapat dilakukan dengan kovarian berdasarkan model persamaan struktural atau *Structural Equation Modelling* (SEM). Perbedaan utama antara konstruk reflektif dan formatif adalah indikator reflektif disebabkan oleh konstruk (panah menunjuk dari konstruk untuk indikator) sedangkan tindakan formatif mewakili contoh di mana indikator menyebabkan konstruk (panah menunjuk dari indikator ke konstruk) (Hair et al., 2014).

PLS-SEM berpotensi melakukan analisis terhadap data yang berukuran besar, termasuk data sekunder yang seringkali tidak membutuhkan pembuktian komprehensif atas dasar teori pengukuran (Rigdon, 2013). Untuk penelitian eksplorasi menggunakan data sekunder, PLS-SEM lebih disukai lantaran interaksi antara teori dan data membutuhkan fleksibilitas yang ditawarkan oleh PLS (Nitzl, 2016). Data sekunder utamanya digunakan untuk mengusulkan hubungan sebab akibat yang mengharuskan peneliti mengutamakan pemeriksaan untuk semua kemungkinan hubungan (Hair et al., 2017).

PLS tidak didasarkan pada banyak asumsi seperti uji normalitas dan multikolinearitas sehingga terbilang metode analisis yang kuat. Selain itu, keunggulan PLS adalah data tidak harus berdistribusi normal multivariat karena indikator yang digunakan berdasarkan skala kategori, ordinal, interval, hingga rasio dapat digunakan pada model yang sama. Keutamaan lainnya mengenai PLS adalah ukuran sampel yang digunakan tidak harus besar. PLS-SEM juga dikembangkan

sebagai alternatif dalam situasi yang mempunyai teori yang lemah serta dapat berperan menangani kekurangan data seperti heterogenitas dan membantu struktur model yang lebih kompleks. PLS dapat menjelaskan hubungan antara variabel laten dan mengkonfirmasi teori melalui uji hipotesis (Hair et al., 1992).

Menurut Sarstedt et al. (2019) proses yang dilakukan peneliti untuk menerapkan PLS-SEM yaitu melalui beberapa tahap yaitu evaluasi model pengukuran (*outer* dan *inner model*) dan evaluasi model struktural. Penilaian *outer model* dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas data suatu penelitian, sedangkan pengujian *inner model* dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel yang sedang diteliti melalui nilai signifikansi, kemudian model struktural digunakan untuk mengetahui nilai R-square model penelitian.

Tidak seperti pengukuran survei yang digunakan untuk mengonfirmasi teori yang sudah berkembang, PLS-SEM juga terbukti berharga dalam menganalisis data sekunder dari perspektif teori pengukuran. Pengukuran yang digunakan dalam sumber data sekunder biasanya tidak dibuat dan disempurnakan seiring waktu untuk analisis konfirmasi, karena peneliti tidak memiliki kesempatan untuk merevisi atau menyempurnakan model pengukuran untuk mencapai fit (Sarstedt & Mooi, 2019). Data sekunder didasarkan pada model pengukuran formatif dan jarang diukur secara reflektif. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis menggunakan PLS-SEM:

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Setelah semua data penelitian yang diperlukan terkumpul, analisis statistik yang dilakukan pertama kali adalah menghitung statistik deskriptif, dengan

menyajikan hasilnya di dalam tabel ataupun grafik yang memudahkan pembaca untuk memahaminya, yaitu berisi angka yang menggambarkan data penelitian secara spesifik. Statistik deskriptif merangkum berbagai aspek tentang data, meliputi nilai minimum, maksimum, *mean* atau rata-rata, serta standar deviasi yang dapat menentukan sifat statistik deskriptif dari setiap jenis variabel. Standar deviasi atau disebut juga simpangan baku adalah akar kuadrat dari varian yang digunakan untuk mendapatkan statistik dispersi. Apabila standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, maka data cenderung tersebar (Larson, 2006).

3.4.2 Penilaian Model Pengukuran Formatif (*Inner Model*)

Tiga hal yang dilakukan dalam model pengukuran formatif adalah indikator kolinearitas, signifikansi statistik, dan relevansi bobot indikator. Indikator kolinearitas dievaluasi menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan menjalankan regresi berganda dari setiap indikator pada semua *item* lain dari konstruk yang sama dalam model pengukuran konstruk yang diukur secara formatif. Tingginya tingkat kolinearitas sejalan dengan tingginya nilai VIF. Masalah kolinearitas antara dua atau lebih indikator formatif dapat membuat hasil menjadi bias yang ditunjukkan dengan nilai $VIF \geq 5$, tetapi juga dapat terjadi jika nilai VIF berada pada angka 3 sampai 5. Angka yang ideal dalam kolinearitas adalah kurang dari 3 (Sarstedt et al., 2019).

3.4.3 Penilaian Model Struktural

Ketika model pengukuran sudah memuaskan dan memenuhi kriteria, yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan penilaian model struktural. Langkah pertama yakni mengevaluasi nilai R^2 (koefisien determinasi) dari variabel endogen,

R^2 berperan dalam mengukur varian yang dijelaskan dalam masing-masing variabel endogen karena merupakan ukuran kekuatan penjelas model. Nilai R^2 berkisar antara nilai 0 sampai dengan 1, dengan rincian bahwa nilai R^2 sebesar 0,25, 0,50, dan 0,75 termasuk dalam kategori lemah, sedang, dan substansial. Dalam beberapa disiplin ilmu yang didasarkan pada konteks, nilai R^2 0,10 dapat dianggap memuaskan (Sarstedt et al., 2019).

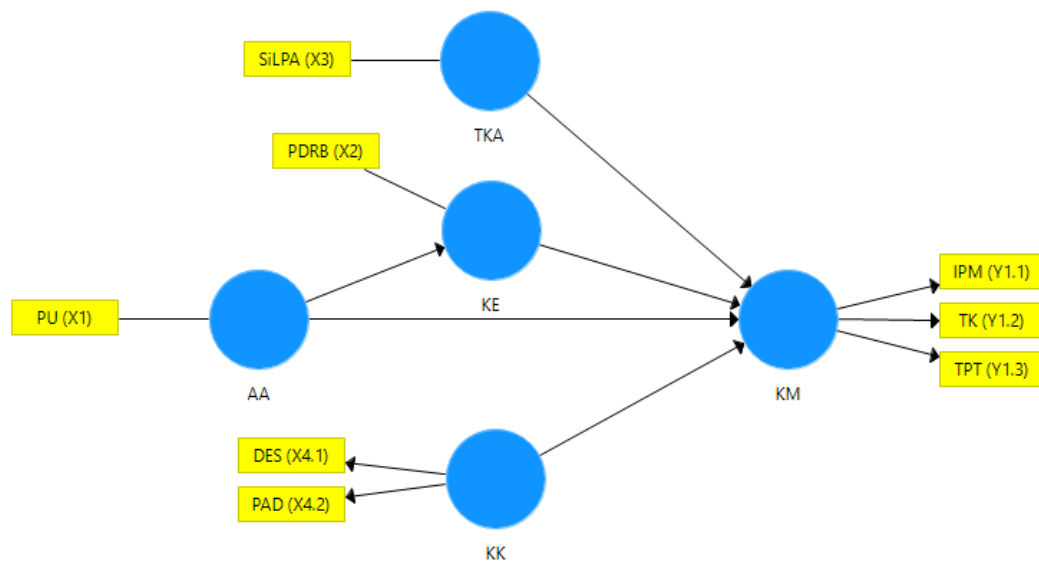
Cara lain untuk mengetahui kekuatan prediksi dalam sampel atau menunjukkan seberapa baik observasi yg dihasilkan adalah dengan melihat besaran ukuran redundansi Q^2 . Sebagai tolak ukur, besaran nilai Q^2 pada kisaran 0 sampai 1, sehingga semakin mendekati 1 dapat dikatakan bahwa observasi yang dilakukan semakin baik, dengan rincian bahwa nilai Q^2 yang lebih dari 0, 0,25, dan 0,50 mengindikasikan relevansi prediktif kecil, sedang, dan besar dari *path model* PLS (Sarstedt et al., 2019).

3.4.4 Pengujian Hipotesis

Pada tahap uji hipotesis menggunakan signifikansi statistik, digunakan metode non parametrik melalui *bootsrapping* yang akan menghasilkan interval kepercayaan untuk pengujian signifikansi. Apabila hasil *p-value* menunjukkan nilai kurang dari 0,05 dapat dikatakan bahwa variabel mempunyai hubungan yang signifikan. Setelah mengetahui signifikansi hubungan antar variabel, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap relevansi bobot indikator pada bagian *original sample* untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Standar bobot dalam rentang nilai -1 sampai +1, bobot mendekati nol menunjukkan hubungan yang

lemah, bobot mendekati -1 atau +1 mengindikasikan hubungan yang negatif atau positif yang kuat (Sarstedt et al., 2019).

3.5 Model Penelitian



Gambar 3.1 Model analisis dengan PLS

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua kriteria, yakni data yang telah dikumpulkan dari publikasi instansi terkait yaitu pada *website* resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta serta data yang telah dikumpulkan dan dihitung melalui proses perhitungan manual yang berasal dari laporan realisasi dan anggaran daerah pada *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun anggaran 2016 hingga 2020. Data penelitian yang telah dikumpulkan dan diolah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1 PDRB atas Harga Konstan Kabupaten/Kota DIY
Tahun 2016-2020 dalam Miliar Rupiah**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bantul	16.375,51	17.209,87	18.150,88	19.155,27	18.838,13
Gunungkidul	11.696,16	12.281,56	12.914,94	13.605,07	13.513,23
Kulon Progo	6.580,68	6.973,41	7.728,41	8.770,75	8.414,75
Sleman	29.563,38	31.140,59	33.138,26	35.286,51	33.906,37
Yogyakarta	23.536,29	24.768,43	26.127,22	27.685,29	27.015,49

Sumber: Publikasi PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten/Kota DIY

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa PDRB kabupaten dan kota di Provinsi Yogyakarta selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan. Atas pergerakan PDRB tersebut, dapat mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi DIY secara keseluruhan berjalan dengan baik. PDRB juga dianggap penting karena dapat memberikan informasi mengenai ukuran ekonomi maupun kinerja ekonomi suatu wilayah (Callen, 2017). Semakin meningkatnya PDRB DIY, menandakan ukuran

ekonomi maupun kinerja ekonomi di DIY juga semakin meningkat. Peningkatan PDRB dapat berakibat langsung terhadap pendapatan per kapita masyarakat dan mendorong daya beli masyarakat atas barang dan jasa pada masing-masing kabupaten dan kota di DIY. Menurut peringkatnya, PDRB paling tinggi berada di Kabupaten Sleman yang berarti nilai tambah barang dan jasa di Kabupaten Sleman berada pada urutan teratas diantara wilayah lainnya di DIY.

Tabel 4.2 Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota DIY Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bantul	78,42	78,67	79,45	80,01	80,01
Gunungkidul	67,82	68,73	69,24	69,96	69,98
Kulon Progo	72,38	73,23	73,76	74,44	74,46
Sleman	82,15	82,85	83,42	83,85	83,84
Yogyakarta	85,32	85,49	86,11	86,65	86,65

Sumber: yogyakarta.bps.go.id

Secara keseluruhan, level pencapaian pembangunan manusia kabupaten dan kota di Provinsi DIY mengalami kenaikan dalam periode 2016 sampai 2020 dengan empat kabupaten dan satu kota di DIY mempunyai IPM yang lebih tinggi dari IPM Indonesia. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta termasuk dalam predikat IPM sangat tinggi karena berada pada angka ≥ 80 , kemudian Kabupaten Bantul dan Kulon Progo termasuk dalam predikat IPM tinggi karena berada pada angka $70 \leq \text{IPM} < 80$, sedangkan Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam predikat IPM sedang karena berada pada angka $60 \leq \text{IPM} < 70$. Dengan berbagai predikat IPM ini, menunjukkan masih belum meratanya IPM antar masing-masing daerah di DIY. Tetapi, dengan adanya peningkatan IPM tersebut, Pemerintah Provinsi DIY telah berhasil dalam melakukan pencapaian terhadap level pembangunan di DIY.

**Tabel 4.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota DIY
Tahun 2016-2020 dalam Persen**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bantul	14,55	14,07	13,43	12,92	13,50
Gunungkidul	19,34	18,65	17,12	16,61	17,07
Kulon Progo	20,30	20,03	18,30	17,39	18,01
Sleman	8,21	8,13	7,65	7,41	8,12
Yogyakarta	7,70	7,64	6,98	6,84	7,27

Sumber: yogyakarta.bps.go.id

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa persebaran penduduk miskin di beberapa wilayah belum menunjukkan pemerataan, daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi DIY berada pada Kabupaten Gunungkidul dan terendah yakni Kota Yogyakarta. Akan tetapi, pada dua kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi menunjukkan penurunan yang signifikan, Pemerintah Provinsi DIY juga berhasil menurunkan angka kemiskinan selama tahun 2016-2019, namun pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pembangunan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat kemiskinan di DIY, karena pertumbuhan yang berkualitas salah satunya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan.

**Tabel 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota DIY
Tahun 2016-2020 dalam Persen**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bantul	2,72	3,12	2,72	3,06	4,06
Gunungkidul	2,72	1,65	2,07	1,92	2,16
Kulon Progo	2,72	1,99	1,49	1,80	3,71
Sleman	2,72	3,51	4,40	3,93	5,09
Yogyakarta	2,72	5,08	6,22	4,80	9,16

Sumber: yogyakarta.bps.go.id

Karena adanya penghematan anggaran pemerintah pada pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2016 maka tidak dilakukan penambahan sampel, sehingga estimasi hanya sampai pada tingkat provinsi (BPS DIY, 2020). Selama lima tahun, tingkat pengangguran DIY mengalami tren kenaikan dan penurunan yang fluktuatif, artinya pemerintah daerah belum mampu menstabilkan maupun menurunkan angka pengangguran yang puncaknya pada tahun 2020 seluruh wilayah DIY mengalami peningkatan pengangguran. Selisih peningkatan tertinggi tahun 2020 pada kota Yogyakarta yang naik sebesar 4,36 persen dibandingkan tahun 2019 dan menjadi angka pengangguran tertinggi se-DIY.

Tabel 4.5 Rasio Efisiensi Belanja Pelayanan Umum Kabupaten/Kota DIY Tahun 2016-2020 dalam Persen

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bantul	92,85	41,22	44,55	103,61	10,37
Gunungkidul	2,00	96,61	97,50	88,81	133,62
Kulon Progo	101,33	93,86	97,06	109,82	54,16
Sleman	105,99	258,94	84,42	98,71	195,97
Yogyakarta	87,43	471,59	203,09	160,55	38,75

Sumber: data sekunder, diolah

Berdasarkan perhitungan realisasi terhadap anggaran belanja fungsi pelayanan umum didapatkan hasil efisiensi belanja yang tercantum pada Tabel 4.5 di atas. Tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat diukur dengan rasio efisiensi belanja. Namun rasio ini tidak ada standar baku yang menyatakan bahwa efisiensi belanja dianggap baik, karena bersifat relatif, bukan absolut. Hanya dapat dikatakan apabila belanja fungsi pemerintah daerah kurang/lebih efisien selama beberapa tahun, dan dapat dinilai bahwa pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensi belanja menunjukkan

persentase kurang dari 100, tetapi dianggap telah melakukan pemborosan jika persentase efisiensi lebih dari 100 (Mahmudi, 2019). Hasil perhitungan yang tertera di dalam Tabel 4.5 menunjukkan angka efisiensi belanja fungsi pelayanan yang tidak stabil pada masing-masing daerah. Dalam satu periode anggaran selama lima tahun berturut-turut, satu sampai dua kabupaten/kota di DIY telah terjadi pemborosan anggaran dalam bidang belanja pelayanan umum karena persentase menunjukkan angka lebih dari 100. Rasio efisiensi belanja paling tinggi yakni kota Yogyakarta pada tahun 2017 mencapai angka 471,59 persen.

Tabel 4.6 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten/Kota DIY Tahun 2016-2020 dalam Persen

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bantul	20,22	23,68	20,77	22,29	22,79
Gunungkidul	12,47	14,69	12,26	12,06	12,73
Kulon Progo	13,27	17,52	13,53	14,22	16,08
Sleman	30,79	31,57	32,96	34,22	31,02
Yogyakarta	34,26	39,60	38,43	39,02	33,13

Sumber: data sekunder, diolah

Perhitungan PAD terhadap total pendapatan daerah menghasilkan rasio yang dapat menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan di daerah. Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi searah dengan tingginya kontribusi PAD (Mahmudi, 2019). Angka derajat desentralisasi di kabupaten dan kota di DIY secara rata-rata mengalami kenaikan meskipun terjadi penurunan angka di beberapa titik, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi mengalami peningkatan. Selama lima tahun, angka derajat desentralisasi tertinggi pada setiap daerah terjadi pada tahun 2017 kecuali Kabupaten Sleman tertinggi pada tahun 2019.

**Tabel 4.7 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten/Kota DIY
Tahun 2016-2020 dalam Persen**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bantul	115,73	133,84	110,12	112,72	102,09
Gunungkidul	119,68	141,06	108,74	111,60	92,81
Kulon Progo	104,55	112,87	101,92	105,17	102,62
Sleman	116,72	118,16	117,28	112,03	83,46
Yogyakarta	107,35	128,55	121,03	108,33	83,83

Sumber: data sekunder, diolah

Rasio efektivitas PAD diperoleh dari realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD dan dapat digunakan sebagai indikator rasio keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah, yaitu tingkat pencapaian pemerintah daerah dalam melangsungkan suatu aktivitas melalui pendapatan yang sebenarnya dengan pendapatan yang dianggarkan (Habbe, 2021). Menurut hasil perhitungan yang telah dilakukan, kabupaten dan kota di Provinsi DIY mempunyai nilai efektivitas PAD dengan kategori sangat efektif yaitu di atas 100 persen, akan tetapi pada tahun 2020 Kabupaten Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta mempunyai nilai efektivitas PAD dengan kategori cukup efektif karena berada pada rentang 90%-99%. Selama lima tahun terakhir, rasio efektivitas PAD DIY tertinggi pada tahun 2017 untuk semua kabupaten dan kota. Secara keseluruhan, Pemerintah Daerah DIY mempunyai kemampuan yang efektif dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. PAD sendiri diperoleh dari retribusi, pajak, dan kekayaan daerah, serta sumber lain yang sah. Dengan pencapaian efektivitas PAD DIY yang berada pada kategori efektif, dapat mengindikasikan tingginya keikutsertaan masyarakat Provinsi DIY dalam melakukan pembayaran retribusi dan pajak daerah.

Tabel 4.8 Rasio Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten/Kota DIY Tahun 2016-2020 dalam Persen

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bantul	176,87	275,52	147,79	106,34	141,37
Gunungkidul	525,28	641,87	158,09	95,80	96,96
Kulon Progo	785,16	155,52	415,77	203,78	331,06
Sleman	309,77	192,73	263,60	233,93	210,10
Yogyakarta	80,00	84,75	370,02	145,71	143,24

Sumber: data sekunder, diolah

Rasio SiLPA diperoleh dari perbandingan antara realisasi SiLPA dengan anggaran SiLPA sehingga menghasilkan persentase seperti pada Tabel 4.8. Rasio SiLPA pada Provinsi DIY dalam jangka waktu lima tahun menunjukkan tingginya realisasi SiLPA daripada yang dianggarkan yang hampir seluruhnya menghasilkan persentase lebih dari 100. Tingginya SiLPA dapat mengindikasikan inkonsistensi atau perubahan regulasi terkait penggunaan APBD dan tidak optimalnya dalam mengalokasikan anggaran (Purbadharmaja et al., 2019).

4.2 Analisis Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan analisis, deskripsi, serta gambaran data variabel secara umum. Adapun statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *standard deviation* dari variabel eksogen alokasi anggaran (AA), kapasitas ekonomi (KE), tata kelola anggaran (TKA), dan kinerja keuangan daerah (KK) dengan indikator rasio belanja efisiensi pelayanan umum (PU), tingkat PDRB, rasio SiLPA, derajat desentralisasi (DES), dan efektivitas PAD serta variabel endogen kesejahteraan masyarakat (KM) dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan (TK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 4.9 Hasil Statistik Deskriptif

<i>Variable</i>	<i>Indicators</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>
AA	PU (X1)	25	2,00	471,59	114,912	92,353
KE	PDRB (X2)	25	6.580,68	35.286,51	19.375,058	9.022,932
TKA	SiLPA (X3)	25	80,00	785,16	251,641	175,167
KK	DES (X4.1)	25	12,06	39,60	23,743	9,556
	PAD (Y4.2)	25	83,46	141,06	110,890	12,999
KM	IPM (Y1.1)	25	67,82	86,65	78,276	6,214
	TK (Y1.2)	25	6,84	20,30	13,090	4,866
	TPT (Y1.3)	25	1,49	9,16	3,422	1,677

Sumber: data sekunder, diolah

Menurut data yang tertera pada Tabel 4.9 di atas, terdapat 25 data pada setiap indikator penelitian yang digunakan untuk sampel penelitian. Berikut merupakan analisis dari hasil statistik deskriptif pada masing-masing variabel:

1. Variabel eksogen alokasi anggaran (AA) yang diukur melalui rasio efisiensi belanja fungsi pelayanan umum (PU) mempunyai nilai minimum sebesar 2,00 yaitu Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 471,59 yaitu Kota Yogyakarta pada tahun 2017. Nilai *mean* atau rata-rata yang dimiliki indikator PU yakni sebesar 114,912 yang berarti pemerintah daerah dianggap telah melakukan pemborosan pada belanja fungsi pelayanan umum karena persentase efisiensi lebih dari 100. Selanjutnya, nilai standar deviasi menunjukkan angka 92,353 yang artinya nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean*, hal ini mencerminkan bahwa data cenderung tersebar atau disebut juga homogen.
2. Variabel eksogen kapasitas ekonomi (KE) yang diukur melalui tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai nilai minimum sebesar 6.580,68 yaitu Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar

35.286,51 yaitu Kabupaten Sleman pada tahun 2019. Nilai *mean* yang dimiliki indikator PDRB yakni sebesar 19.375,058 yang berarti nilai tambah barang dan jasa selama lima tahun terakhir pada kabupaten dan kota di DIY mempunyai nilai rata-rata sebesar 19.375,058. Selanjutnya, nilai standar deviasi menunjukkan angka 9.022,932 yang artinya nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean*, hal ini mencerminkan bahwa data cenderung tersebar atau disebut juga homogen.

3. Variabel eksogen tata kelola anggaran (TKA) yang diukur melalui rasio Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mempunyai nilai minimum sebesar 80,00 yaitu Kota Yogyakarta pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 785,16 yaitu Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016. Nilai *mean* atau rata-rata yang dimiliki indikator SiLPA yakni sebesar 251,641 yang berarti kurang optimalnya pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran dan mengindikasikan inkonsistensi atau perubahan regulasi terkait penggunaan APBD karena menghasilkan persentase di atas 100. Selanjutnya, nilai standar deviasi menunjukkan angka 175,167 yang artinya nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean*, hal ini mencerminkan bahwa data cenderung tersebar atau disebut juga homogen.
4. Variabel eksogen kinerja keuangan (KK) diukur melalui dua indikator, yaitu rasio derajat desentralisasi (DES) dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio derajat desentralisasi mempunyai nilai minimum sebesar 12,06 yaitu Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 39,60 yaitu Kota Yogyakarta pada tahun 2017. Nilai *mean* atau rata-rata yang

dimiliki indikator derajat desentralisasi yakni sebesar 23,743. Selanjutnya, nilai standar deviasi menunjukkan angka 9,556 yang artinya nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean*, hal ini mencerminkan bahwa data cenderung tersebar atau disebut juga homogen.

Rasio efektivitas PAD mempunyai nilai minimum sebesar 83,46 yaitu Kabupaten Sleman pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 141,06 yaitu Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017. Nilai *mean* atau rata-rata yang dimiliki indikator efektivitas PAD yakni sebesar 110,890 yang berarti pemerintah daerah mempunyai kemampuan yang sangat efektif dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan karena berada pada angka di atas 100 persen. Selanjutnya, nilai standar deviasi menunjukkan angka 12,999 yang artinya nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean*, hal ini mencerminkan bahwa data cenderung tersebar atau disebut juga homogen.

5. Variabel endogen kesejahteraan masyarakat (KM) diukur melalui tiga indikator, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan (TK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Angka IPM mempunyai nilai minimum sebesar 67,82 yaitu Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 86,65 yaitu Kota Yogyakarta pada tahun 2019 dan 2020. Nilai *mean* yang dimiliki indikator IPM yakni sebesar 78,276 yang berarti rata-rata IPM Provinsi DIY termasuk dalam predikat IPM tinggi karena berada pada angka $70 \leq \text{IPM} < 80$. Selanjutnya, nilai standar deviasi menunjukkan angka 6,214 yang artinya nilai standar deviasi lebih kecil

dari nilai *mean*, hal ini mencerminkan bahwa data cenderung tersebar atau disebut juga homogen.

Tingkat kemiskinan DIY mempunyai nilai minimum sebesar 6,84 yaitu Kota Yogyakarta pada tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 20,30 yaitu Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016. Nilai *mean* atau rata-rata yang dimiliki indikator tingkat kemiskinan yakni sebesar 13,090 yang berarti persebaran penduduk miskin beberapa wilayah di Provinsi DIY belum menunjukkan pemerataan. Selanjutnya, nilai standar deviasi menunjukkan angka 4,866 yang artinya nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean*, hal ini mencerminkan bahwa data cenderung tersebar atau disebut juga homogen.

Tingkat Pengangguran Terbuka DIY mempunyai nilai minimum sebesar 1,49 yaitu Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 9,16 yaitu Kota Yogyakarta pada tahun 2020. Nilai *mean* atau rata-rata yang dimiliki indikator TPT yakni sebesar 3,422 yang berarti pemerintah daerah belum mampu menstabilkan maupun menurunkan angka pengangguran di Provinsi DIY. Selanjutnya, nilai standar deviasi menunjukkan angka 1,677 yang artinya nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean*, hal ini mencerminkan bahwa data cenderung tersebar atau disebut juga homogen.

4.3 Penilaian Model Pengukuran Formatif (*Inner Model*)

Setelah melakukan proses analisis hasil statistik deskriptif, langkah selanjutnya yaitu penilaian terhadap model pengukuran formatif yang dievaluasi berdasarkan indikator kolinearitas menggunakan nilai VIF serta uji hipotesis

menggunakan signifikansi statistik dan relevansi bobot indikator yang akan dipaparkan sebagai berikut:

4.3.1 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.10 Hasil Penilaian Uji Multikolinearitas

<i>Variable</i>	<i>Indicators</i>	<i>Collinearity</i>
		<i>VIF</i>
AA	PU (X1)	1,000
KE	PDRB (X2)	1,000
TKA	SiLPA (X3)	1,000
KK	DES (X4.1)	1,003
	PAD (Y4.2)	1,003

Sumber: data sekunder, diolah

Uji multikolinearitas pada PLS menggunakan perhitungan faktor *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk memastikan bahwa antar indikator di dalam variabel eksogen tidak terjadi korelasi yang dapat menyebabkan penelitian menjadi bias. Oleh sebab itu, penilaian uji multikolinearitas sangat penting ketika model mencakup konstruksi yang diukur secara formatif. Semakin tingginya nilai VIF atau apabila nilai VIF menunjukkan angka di atas 5, maka dapat menunjukkan masalah multikolinearitas. Penilaian ideal untuk VIF yakni harus mendekati 3 atau lebih rendah (Sarstedt et al., 2019). Pada tabel 4.10 di atas, ditemukan hasil penilaian uji multikolinearitas bahwa nilai VIF tertinggi yaitu 1,003 dari indikator derajat desentralisasi dan efektivitas PAD yang berada di bawah nilai ambang batas 5, yang dapat disimpulkan bahwa indikator di dalam variabel eksogen tidak terjadi korelasi atau tidak mengalami masalah multikolinearitas.

4.4 Penilaian Model Struktural (Uji Goodness of Fit)

Penilaian model struktural atau uji *goodness of fit* bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel eksogen terhadap variabel endogen, atau

dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel alokasi anggaran terhadap kapasitas ekonomi, dan kapasitas ekonomi, tata kelola anggaran, maupun kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penilaian model struktural menggunakan *R-square* untuk mengukur varians yang dijelaskan pada masing-masing variabel endogen dan nilai *predictive relevance* (Q^2) dengan prosedur *blindfolding* untuk menunjukkan akurasi prediksi dalam penelitian atau seberapa baik nilai observasi yang dilakukan (Sarstedt et al., 2019). Nilai *R-square* maupun *predictive relevance* (Q^2) akan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11 *R-square*

<i>Variables</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
Kesejahteraan Masyarakat	0,953	0,944
Kapasitas Ekonomi	0,119	0,081

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel 4.12 *Predictive Relevance* (Q^2)

<i>Variables</i>	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
Kesejahteraan Masyarakat	0,953	0,944	0,786
Kapasitas Ekonomi	0,119	0,081	0,095

Sumber: data sekunder, diolah

Dari hasil uji *goodness of fit* dengan menghasilkan nilai R^2 dan Q^2 pada Tabel 4.11 dan 4.12 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,944 atau 94,4% untuk variabel kesejahteraan masyarakat dan sebesar 0,081 atau 8,1% untuk variabel kapasitas ekonomi. Maka disimpulkan bahwa variabel endogen kesejahteraan masyarakat dipengaruhi secara substansial atau kuat oleh variabel eksogen karena $R^2 > 0,75$ sedangkan untuk variabel endogen kapasitas ekonomi dipengaruhi secara lemah oleh variabel eksogen karena $R^2 < 0,25$.

Selanjutnya, nilai *predictive relevance* (Q^2) menghasilkan angka 0,786 atau 78,6% untuk variabel kesejahteraan masyarakat dan sebesar 0,095 atau 9,5% untuk variabel kapasitas ekonomi. Karena nilai $Q\ square > 0$ maka dapat dikatakan kedua variabel endogen mempunyai nilai observasi yang baik, yaitu kesejahteraan masyarakat memiliki nilai *predictive relevance* kecil karena $Q^2 > 0$ dan kapasitas ekonomi memiliki nilai *predictive relevance* besar karena $Q^2 > 0,5$.

Nilai *predictive relevance* kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan bahwa keragaman data yang dijelaskan oleh model adalah 78,6%, atau dengan kata lain, informasi yang terkandung dalam data sebesar 78,6% dapat dijelaskan oleh model. Sedangkan sisanya sebesar 21,4% dijelaskan oleh variabel lain (yang tidak terdapat dalam model) dan *error*. Oleh karena itu, model struktural yang dibangun sudah tepat.

4.5 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dengan menjalankan prosedur *bootstrapping* dengan *subsamples* 500 dan tingkat signifikansi 0,05 sehingga menghasilkan *original sample* dan *p-value* seperti pada Tabel 4.13. Kriteria yang digunakan untuk melihat adanya hubungan yang signifikan yaitu apabila nilai *p-value* < tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen. Selanjutnya, untuk mengetahui arah hubungan antar variabel yaitu menggunakan relevansi bobot indikator pada tabel *original sampel*, bobot mendekati nol menunjukkan hubungan yang lemah, bobot mendekati -1 atau +1 mengindikasikan

hubungan yang negatif atau positif yang kuat (Sarstedt et al., 2019). Berikut adalah tabel hasil uji hipotesis dengan prosedur *bootstrapping*:

Tabel 4.13 Hasil Penilaian Uji Hipotesis (*Direct Effects*)

<i>Variable</i>	<i>Indicators</i>	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>P Values</i>
<i>Direct Effects</i>					
AA	PU → PDRB	0,345	0,362	0,118	0,004
	PU → IPM	0,105	0,080	0,128	0,414
	PU → TK	-0,106	-0,089	0,088	0,227
	PU → TPT	0,009	0,012	0,239	0,971
KE	PDRB → IPM	0,828	0,834	0,020	0,000
	PDRB → TK	-0,946	-0,948	0,013	0,000
	PDRB → TPT	0,606	0,633	0,089	0,000
TKA	SiLPA → IPM	-0,398	-0,390	0,174	0,022
	SiLPA → TK	0,426	0,410	0,167	0,011
	SiLPA → TPT	-0,189	-0,183	0,147	0,201
KK	DES → IPM	0,960	0,957	0,035	0,000
	DES → TK	-0,961	-0,962	0,025	0,000
	DES → TPT	0,722	0,740	0,114	0,000
	PAD → IPM	-0,161	-0,156	0,058	0,005
	PAD → TK	0,108	0,106	0,038	0,004
	PAD → TPT	-0,343	-0,309	0,158	0,030

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel 4.14 Hasil Penilaian Uji Hipotesis (*Indirect Effects*)

<i>Variable</i>	<i>Indicators</i>	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>P Values</i>
<i>Indirect Effects</i>					
AA	PU → PDRB → IPM	0,286	0,302	0,099	0,004
	PU → PDRB → TK	-0,326	-0,343	0,112	0,004
	PU → PDRB → TPT	0,209	0,231	0,087	0,017

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil pengujian hipotesis untuk *direct effects* dan *indirect effects* dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hipotesis pertama dalam penelitian ini ialah alokasi anggaran (AA) berpengaruh positif signifikan terhadap kapasitas ekonomi (KE). Dalam Tabel 4.13,

parameter hubungan yang ditunjukkan pada kolom *original sample* yaitu pengaruh antara alokasi anggaran dalam bidang belanja fungsi pelayanan umum terhadap kapasitas ekonomi dengan indikator PDRB yaitu sebesar 0,345 dengan *p-value* sebesar 0,004. Untuk tingkat signifikansi 5%, pengaruh alokasi anggaran terhadap kapasitas ekonomi adalah signifikan karena mempunyai nilai *p-value* $< 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kapasitas ekonomi sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini didukung.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hipotesis kedua dalam penelitian ini ialah kapasitas ekonomi (KE) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (KM). Dalam Tabel 4.13, parameter hubungan yang ditunjukkan pada kolom *original sample* yaitu pengaruh antara kapasitas ekonomi dengan indikator PDRB terhadap kesejahteraan masyarakat dengan indikator IPM yaitu sebesar 0,828 kemudian indikator tingkat kemiskinan (TK) sebesar -0,946 dan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,606 dengan *p-value* untuk semua indikator tersebut sebesar 0,000. Untuk tingkat signifikansi 5%, pengaruh kapasitas ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah signifikan karena mempunyai nilai *p-value* $< 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran terbuka, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini didukung.

3. Pengaruh Tidak Langsung Hipotesis Pertama dan Kedua

Pada Tabel 4.13 memperlihatkan bahwa pengaruh langsung alokasi anggaran (AA) dalam bidang belanja fungsi pelayanan umum (PU) terhadap kesejahteraan masyarakat pada indikator IPM yaitu sebesar 0,105 dengan *p-value* 0,414 kemudian indikator tingkat kemiskinan (TK) sebesar -0,106 dengan *p-value* 0,227 dan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,009 dengan *p-value* 0,971. Untuk tingkat signifikansi 5%, pengaruh alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat adalah PU berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap TK serta berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM dan TPT.

Selanjutnya, pada Tabel 4.14 memperlihatkan pengaruh tidak langsung alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kapasitas ekonomi. PU terhadap IPM, TK, dan TPT melalui PDRB mempunyai parameter hubungan yang ditunjukkan pada kolom *original sample* dengan masing-masing sebesar 0,286, -0,326, dan 0,209 dengan nilai *p-value* < 0,05 untuk semua indikator, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kapasitas ekonomi adalah PU berpengaruh negatif signifikan terhadap TK serta berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dan TPT.

Atas dasar pengaruh langsung alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat maupun pengaruh tidak langsung alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dengan kapasitas ekonomi sebagai variabel intervening dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan *full mediation*, yang artinya alokasi anggaran tidak mampu mempengaruhi secara signifikan kesejahteraan masyarakat tanpa melalui kapasitas ekonomi, sehingga dalam hal ini variabel mediasi berperan secara penuh.

4. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ialah tata kelola anggaran (TKA) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (KM). Dalam Tabel 4.13, parameter hubungan yang ditunjukkan pada kolom *original sample* yaitu pengaruh tata kelola anggaran dengan indikator rasio SiLPA terhadap kesejahteraan masyarakat dengan indikator IPM yaitu sebesar -0,398 kemudian indikator tingkat kemiskinan (TK) sebesar 0,426 dan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar -0,189 dengan *p-value* masing-masing indikator tersebut sebesar 0,022, 0,011, dan 0,201. Untuk tingkat signifikansi 5%, pengaruh kapasitas ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah signifikan terhadap IPM dan TK karena mempunyai nilai *p-value* < 0,05 sedangkan terhadap TPT tidak signifikan karena nilai *p-value* > 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa SiLPA berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dan positif signifikan terhadap TK, tetapi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap TPT.

5. Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Hipotesis keempat dalam penelitian ini ialah kinerja keuangan (KK) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (KM). Dalam Tabel 4.13, parameter hubungan yang ditunjukkan pada kolom *original sample* yaitu pengaruh antara kinerja keuangan dengan indikator derajat desentralisasi (DES) terhadap kesejahteraan masyarakat dengan indikator IPM yaitu sebesar 0,960, kemudian indikator tingkat kemiskinan (TK) sebesar -0,961, dan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,722 dengan *p-value* untuk semua indikator tersebut sebesar 0,000. Sementara indikator rasio PAD terhadap IPM yaitu sebesar

-0,161 kemudian indikator TK sebesar 0,108 dan indikator TPT sebesar -0,343 dengan *p-value* masing-masing 0,005, 0,004, dan 0,030. Untuk tingkat signifikansi 5%, pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah signifikan karena mempunyai nilai *p-value* < 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DES berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dan TPT serta negatif signifikan terhadap TK, sedangkan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap TK serta negatif signifikan terhadap IPM dan TPT, sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini didukung.

4.6 Pembahasan Uji Hipotesis

4.6.1 Pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Kapasitas Ekonomi

Hipotesis pertama dirumuskan bahwa alokasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kapasitas ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian Tabel 4.13 dapat dibuktikan bahwa alokasi anggaran dalam bidang belanja fungsi pelayanan umum berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB sebagai indikator kapasitas ekonomi dengan koefisien parameter 0,345 dan *p-value* sebesar 0,004. Artinya, semakin tinggi alokasi anggaran belanja fungsi pelayanan umum akan meningkatkan nilai PDRB pada kabupaten dan kota di DIY.

Selama periode anggaran 2016-2020, alokasi fungsi pelayanan umum yang dikelola pemerintah daerah berjalan secara efisien meskipun satu sampai dua kabupaten/kota di DIY terjadi pemborosan anggaran, hal ini sejalan dengan teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa di dalam sektor publik, pemerintah berperan sebagai agen dan masyarakat berperan sebagai prinsipal yang digambarkan masyarakat memilih pemerintah dalam melakukan

berbagai layanan dan mengatur anggaran seperti APBD dan bentuk tanggung jawab atas wewenang yang diberikan tersebut yakni Pemerintah Daerah DIY melakukan alokasi anggaran secara efisien.

Fungsi pelayanan umum terdiri atas pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan, pengelolaan jaringan irigasi serta pengairan lainnya, subsidi, pembayaran bunga utang, dan lain-lain (Kemenkeu, 2017) yang diperuntukkan serta didistribusikan dalam pembiayaan kegiatan yang hasil, manfaat, serta dampaknya dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan efisiensi alokasi anggaran oleh pemerintah daerah akan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY, kemudian peningkatan ekonomi tersebut dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mendorong pendapatan per kapita dan menstimulasi daya beli masyarakat atas barang dan jasa yang berakibat pada kenaikan nilai PDRB yaitu dibuktikan PDRB Provinsi DIY selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbadharmaja et al. (2019) dan Elia et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa kapasitas ekonomi dapat ditingkatkan melalui alokasi anggaran.

4.6.2 Pengaruh Kapasitas Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis kedua dirumuskan bahwa kapasitas ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian Tabel 4.13 dapat dibuktikan bahwa PDRB sebagai indikator kapasitas ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran terbuka sebagai

komponen kesejahteraan masyarakat dengan koefisien parameter $-0,946$, $0,828$, dan $0,606$ serta nilai $p\text{-value} < 0,05$. Artinya, PDRB menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan IPM serta tingkat pengangguran pada kabupaten dan kota di DIY.

Tabel 4.1 memperlihatkan selama lima tahun PDRB Provinsi DIY mengalami peningkatan yang dapat menandakan laju pertumbuhan ekonomi DIY berjalan dengan baik, hal ini juga tidak terlepas dari keberhasilan peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dan pengeluaran pemerintah dalam berbagai sektor. Hasil ini sejalan dengan teori agensi bahwa pemerintah yang berperan sebagai agen dalam melaksanakan tugasnya lebih mengarah pada kepentingan bersama sehingga tidak terjadi masalah yang dapat menimbulkan konflik keagenan.

Peningkatan kapasitas perekonomian wilayah DIY dalam menghasilkan barang dan jasa dari satu periode ke periode berikutnya dapat dilihat sebagai indikator pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi di Provinsi DIY. Pertumbuhan yang berkualitas ditandai dengan penurunan angka kemiskinan dan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di DIY dengan rata-rata IPM dalam predikat tinggi dengan nilai $78,3$. Salah satu ukuran dasar IPM ialah standar hidup yang layak diukur dengan pendapatan per kapita yang sejalan dengan daya beli masyarakat yaitu berkaitan dengan kapasitas ekonomi. Namun, kapasitas ekonomi belum mampu menstabilkan maupun menurunkan angka pengangguran di DIY, yang puncaknya pada tahun 2020 seluruh kabupaten dan kota di DIY mengalami peningkatan pengangguran.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elia et al. (2020), Purbadharmaja et al. (2019) dan Sofilda et al., (2015) yang menyimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mempunyai keterkaitan dengan kapasitas ekonomi. Peningkatan kapasitas ekonomi akan mendorong sektor swasta untuk berinvestasi di daerah sehingga pendapatan pun akan meningkat.

4.6.3 Pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Kapasitas Ekonomi sebagai Variabel Intervening

Pengaruh langsung alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat pada Tabel 4.13 dengan tingkat signifikansi 5% adalah alokasi fungsi belanja pelayanan umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran. Sementara itu, pengaruh tidak langsung alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kapasitas ekonomi pada Tabel 4.14 adalah alokasi fungsi belanja pelayanan umum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran.

Efisiensi alokasi anggaran khususnya belanja fungsi pelayanan umum pada Provinsi DIY memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang merepresentasikan laju pertumbuhan, ukuran, maupun kinerja ekonomi DIY berjalan dengan baik, Kondisi ini meningkatkan angka IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan di DIY, namun belum mampu menurunkan tingkat pengangguran pada lima tahun terakhir.

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 4.13 dan 4.14, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran tidak mampu mempengaruhi secara signifikan kesejahteraan masyarakat tanpa melalui kapasitas ekonomi, yang dinamakan hubungan *full mediation*, akibatnya kapasitas ekonomi berperan penuh sebagai variabel mediasi.

4.6.4 Pengaruh Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis ketiga dirumuskan bahwa tata kelola anggaran berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.13, dapat dibuktikan bahwa SiLPA sebagai indikator tata kelola anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran sebagai komponen kesejahteraan masyarakat, yaitu masing-masing dengan koefisien parameter $-0,398$, $0,426$, dan $-0,189$. Artinya, SiLPA menurunkan angka IPM dan meningkatkan tingkat kemiskinan tetapi tidak menurunkan tingkat pengangguran pada kabupaten dan kota di DIY.

Anggaran mencerminkan bagaimana sektor publik mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran dalam batas yang ditentukan, karena pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bergantung pada implementasi anggaran yang efektif (Hackbart & Ramsey, 2002; Otolor & Oti, 2020). Oleh karena itu, rasio SiLPA digunakan sebagai indikator penyerapan anggaran dalam pembangunan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di DIY. Hasil ini sejalan dengan teori legitimasi menurut Dowling & Pfeffer (1975) bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, apabila pemerintah

berkinerja baik, akan meningkatkan kualitas pekerjaan dan juga memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat.

Tingginya rasio SiLPA selama tahun 2016-2020 pada Provinsi DIY yang rata-ratanya menunjukkan persentase lebih dari 100 mengindikasikan perubahan regulasi APBD dan belum optimalnya pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, karena alokasi anggaran yang efektif ditandai dengan SiLPA yang rendah. Kualitas pengelolaan APBD yang tercermin pada rasio SiLPA belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY, karena tingginya SiLPA menurunkan angka IPM dan meningkatkan tingkat kemiskinan, demikian juga tidak menurunkan tingkat pengangguran pada kabupaten dan kota di DIY.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adiputra et al. (2017) dan Purbadharmaja et al. (2019) yang menyatakan bahwa dalam membangun kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan pengelolaan anggaran yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan karena dibutuhkan dana dalam melakukan berbagai program pembangunan.

4.6.5 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis keempat dirumuskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.13, dapat dibuktikan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah signifikan karena mempunyai nilai $p\text{-value} < 0,05$. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran serta negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara PAD

berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta negatif signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran. Artinya, derajat desentralisasi meningkatkan angka IPM dan pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan, sementara efektivitas PAD menurunkan angka IPM dan pengangguran serta meningkatkan angka kemiskinan di kabupaten dan kota di DIY.

Kinerja keuangan pemerintah daerah digambarkan sebagai suatu hasil yang diraih selama periode anggaran dalam aspek keuangan daerah yang dalam penelitian ini mencakup rasio derajat desentralisasi dan efektivitas PAD. Kinerja keuangan tersebut mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai hasil keuangan yang diukur terhadap *output* yang diinginkan, yaitu *output* yang berupa kesejahteraan masyarakat DIY. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling & Pfeffer (1975) yaitu perikatan antara pemerintah dengan masyarakat yang berhubungan dengan sumber ekonomi. Dalam menjalankan aktivitasnya, pemerintah harus sesuai dengan norma sosial yang berlaku dan berhak memperoleh dukungan dari masyarakat agar dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga harapan dari masyarakat dapat terpenuhi.

Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui analisis rasio keuangan yang dapat memberikan informasi penyusunan kebijakan yang positif bagi masyarakat. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah derajat desentralisasi. Kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi mengalami peningkatan yang ditandai dengan angka derajat desentralisasi di kabupaten dan kota di DIY secara rata-rata mengalami kenaikan meskipun terjadi penurunan angka di beberapa titik dengan

rata-rata keseluruhan wilayah sebesar 23,743. Peran PAD dalam pengelolaan desentralisasi di Provinsi DIY yaitu digambarkan dengan level pencapaian pembangunan manusia dalam predikat IPM tinggi dan mengurangi tingkat kemiskinan, namun belum efektif dalam menurunkan angka pengangguran.

Untuk melihat tingkat pencapaian pemerintah daerah dalam melangsungkan suatu aktivitas melalui perbandingan pendapatan sebenarnya dengan pendapatan anggaran (Habbe, 2021) digunakan analisis rasio keuangan kedua yakni efektivitas PAD. Melalui hasil perhitungan, secara keseluruhan Pemerintah Daerah DIY mempunyai kemampuan yang efektif dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan, dengan rata-rata yang dimiliki rasio efektivitas PAD yakni sebesar 110,89. Melalui pencapaian ini, efektivitas PAD dapat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran, tetapi gagal dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan angka IPM.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indramawan (2018) pada wilayah Papua dan Papua Barat yang mengemukakan IPM mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal, tetapi mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap rasio efektivitas PAD kemudian Habbe (2021) menyatakan efektivitas PAD dapat menurunkan tingkat pengangguran tetapi gagal meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sebaliknya, penelitian ini belum sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mutiha (2018) pada provinsi di Indonesia dan Adiputra et al. (2017) pada Provinsi Bali yaitu kualitas pembangunan manusia (IPM) mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap PAD.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Kinerja Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020” yang telah dilakukan peneliti melalui proses pengujian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kapasitas ekonomi

Alokasi anggaran belanja fungsi pelayanan umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sebagai indikator kapasitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi alokasi anggaran belanja fungsi pelayanan umum akan meningkatkan nilai PDRB pada kabupaten dan kota di DIY. Alokasi anggaran yang baik dalam memberikan pelayanan publik yang memadai akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan berakibat pada kenaikan kapasitas ekonomi.

2. Kapasitas ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat PDRB sebagai indikator kapasitas ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran sebagai komponen kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas perekonomian berperan menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM namun belum mampu menstabilkan maupun menurunkan angka pengangguran pada kabupaten dan kota di DIY.

3. Tata kelola anggaran berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

SiLPA sebagai indikator tata kelola anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya rasio SiLPA pada kabupaten dan kota di DIY belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY, karena tingginya SiLPA menurunkan angka IPM dan meningkatkan tingkat kemiskinan, demikian juga tidak menurunkan tingkat pengangguran.

4. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
- Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten dan kota di DIY adalah signifikan, yaitu derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap IPM dan tingkat pengangguran serta negatif terhadap tingkat kemiskinan, sementara PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan serta negatif terhadap IPM dan tingkat pengangguran. Peran PAD dalam mengelola desentralisasi digambarkan dengan IPM dalam predikat tinggi dan penurunan tingkat kemiskinan, namun belum efektif dalam menurunkan angka pengangguran. Berikutnya, efektivitas PAD berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran, tetapi gagal dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan angka IPM.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel eksogen sebagai aspek kinerja perekonomian dalam mengevaluasi pengaruhnya terhadap kesejahteraan

masyarakat yang terbatas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta saja. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah penggunaan indikator setiap variabel eksogen hanya terbatas pada satu sampai dua indikator, seperti lima variabel laten dengan total delapan indikator.

5.3 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan penelitian yang sudah dikemukakan di atas antara lain:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan penambahan variabel dan indikator, seperti belanja fungsi ekonomi, pendidikan, serta kesehatan agar mempunyai cakupan yang lebih luas.
2. Penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan wilayah atau provinsi lain seperti Provinsi Papua yang mempunyai IPM rendah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.
3. Menggunakan analisis rasio keuangan lain dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah seperti rasio efisiensi PAD dan rasio lainnya.
4. Melakukan pertimbangan aspek lain dari tata kelola anggaran yang baik seperti opini dari BPK terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

5.4 Implikasi Hasil Penelitian

Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan pihak-pihak terkait mengenai hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah daerah dalam melakukan penyelenggaraan desentralisasi mengalami peningkatan dan secara efektif memobilisasi penerimaan PAD

sesuai dengan yang ditargetkan. Selain itu, pertumbuhan maupun kinerja ekonomi DIY menunjukkan hasil yang baik. Di sisi lain, yang perlu diperhatikan adalah dalam pengelolaan anggaran fungsi pelayanan umum terjadi pemborosan anggaran pada beberapa kabupaten. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemerataan IPM dan kemiskinan di masing-masing kabupaten dan kota, bahkan angka pengangguran di DIY juga belum menunjukkan penurunan. Lebih lanjut, diperlukan upaya memaksimalkan tingkat penyerapan anggaran dan kualitas pengelolaan APBD yang tercermin pada SiLPA.

2. Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan, tidak hanya pemerintah saja yang berperan serta, tetapi keterlibatan masyarakat juga sama pentingnya. Pemerintah yang berperan menjalankan aktivitas organisasi harus memperoleh dukungan penuh dan pantauan dari masyarakat agar dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sehingga tujuan dapat tercapai. Sebagai contoh, PAD diperoleh dari retribusi, pajak, dan kekayaan lainnya. Apabila masyarakat ikut serta dan disiplin dalam pembayaran retribusi dan pajak daerah, akan meningkatkan penyelenggaraan desentralisasi di Provinsi DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Halim, A. (2006a). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1).
- Abdullah, S., & Halim, A. (2006b). Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemerintahan dan sumber pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2), 17–32. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2168571>
- Adegun, J. A. (2005). *Variables in Educational Research*. Lagos: Premier Publishers.
- Adiputra, I. M. P., Dwiyantari, N. K. D., & Darmada, D. K. (2017). *Pengaruh PAD , Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Bali)*. 1–34.
- Antara News. (2021). *Jumlah pulau Indonesia kini 17.000*. Diakses pada 23 Oktober 2021, dari <https://www.antaraneews.com/infografik/2387405/jumlah-pulau-indonesia-kini-17000>
- Atkinson, A. A., Banker, R. D., Kaplan, R. S., & Young, S. M. (1997). *Management Accounting* (2nd ed.). Prentice Hall Inc.
- BPS. (2021a). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi 2018-2020*. Diakses pada 25 Oktober 2021, dari <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>
- BPS. (2021b). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Diakses pada 23 Oktober 2021, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- BPS. (2021c). *Indeks Pembangunan Manusia*. Diakses pada 24 Oktober 2021, dari <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>
- BPS DIY. (2020). *Statistik Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2018-2019*.
- BPS DIY. (2021). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta menurut Pengeluaran 2016-2020*. In *Publikasi PDRB*.
- BPS DIY, & Bappeda DIY. (2020). *Analisis Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020*. Tersedia dari <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/publikasi/detail/30-analisis-ketimpangan-pendapatan-diy-2020>
- Callen, T. (2017). Gross Domestic Product: An Economy's All. In *Finance and Development: Economic Concepts Explained* (pp. 14–15). International Monetary Fund.

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approach* (4th ed.). Sage Publications.
- Dawson, G. S., Denford, J. S., Williams, C. K., Preston, D., & Desouza, K. C. (2016). An Examination of Effective IT Governance in the Public Sector Using the Legal View of Agency Theory. *Journal of Management Information Systems*, 33(4), 1180–1208. <https://doi.org/10.1080/07421222.2016.1267533>
- Dian. (2017). *Apa Perbedaan SILPA dan SiLPA*. Diakses pada 17 November 2021, dari <https://blud.co.id/wp/silpa-dan-silpa-apa-perbedaanya/>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Pacific Sociological Association Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Source: The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Economic Times. (2016). *Definition of Human Development Index*. Diakses pada 1 Januari 2022, dari <https://economictimes.indiatimes.com/definition/human-development-index>
- Egbunike, C. F., & Okerekeoti, C. U. (2018). Macroeconomic factors, firm characteristics and financial performance: A study of selected quoted manufacturing firms in Nigeria. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(2), 142–168. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2018-0029>
- Elia, A., Yulianto, Y., Tiawon, H., Sustiyah, S., & Indrajaya, K. (2020). Government expenditure and poverty reduction in the proliferation of new administrative areas of Central Kalimantan, Indonesia. *Journal of Socioeconomics and Development*, 3(2), 145. <https://doi.org/10.31328/jsed.v3i2.1410>
- Festiani, S. (2015). *Pertumbuhan Ekonomi tak Merata, Pengamat: Akibat Ketimpangan Infrastruktur*. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/05/07/nny3e7-pertumbuhan-ekonomi-tak-merata-pengamat-akibat-ketimpangan-infrastruktur>
- Firman, T. (2004). Demographic and Spatial Patterns of Indonesia's Recent Urbanisation. *Population, Space and Place*, 10(6), 421–434. <https://doi.org/10.1002/psp.339>
- Habbe, A. H. (2021). The exploration of effect of financial performance to the public welfare. *International Journal of Law and Management*, 63(5), 464–478. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2017-0222>
- Hackbart, M., & Ramsey, J. R. (2002). The theory of the public sector budget: An economic perspective. In *Budget theory in the public sector* (pp. 172–187). London: Quorum Books.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. ., & Black, W. C. (1992). *Multivariate Data Analysis: With Readings*. New York: McMillan Publisher.
- Hair, J. F., Hollingsworth, C. L., Randolph, A. B., & Chong, A. Y. L. (2017). An Updated and Expanded Assessment of PLS-SEM in Information Systems

Research. *Industrial Management & Data Systems*.

- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Hanum, N., & Sarlia, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Konsumsi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 84–92.
- Hernández, I. P., & Munoz, J. A. V. (2017). Endogenous growth and economic capacity: Theory and empirical evidence for the NAFTA countries. *PSL Quarterly Review*, 70(282). https://doi.org/10.13133/2037-3643_70.282_2
- Hybels, R. C. (1995). On legitimacy, legitimation, and organizations. *Academy of Management Best Papers Proceedings, August*, 241–246. <https://doi.org/10.5465/AMBPP.1995.17536509>
- Indramawan, D. (2018). Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua. *Simposium Nasional Keuangan*, 23. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/261>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kazerooni, E. A. (2001). Population and sample. *American Journal of Roentgenology*, 177(5), 993–999. <https://doi.org/10.2214/ajr.177.5.1770993>
- Kemenkeu. (2017). Informasi APBN 2017 “APBN yang lebih kredibel dan berkualitas di tengah ketidakpastian global.” In *Informasi APBN 2017*.
- Larson, M. G. (2006). Descriptive Statistics and Graphical Displays. *Circulation*, 114(1), 76–81. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.584474>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mieseigha, E. G., & Adeniyi, S. I. (2013). Budget: A Tool for Business Management and Economy Engineering. *Global Business and Economics Research Journal*, 2(10), 1–17. <http://www.journal.globejournal.org>
- Mutiha, A. H. (2018). The Effect of Regional Own-source Revenue, Tax Revenue-sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to the Human Development Index (Based on the Study of Provincial Government in Indonesia). *KnE Social Sciences*, 3(11), 609. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.2792>
- Nitzl, C. (2016). The Use of Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM) in Management Accounting Research: Directions for Future Theory Development. *Journal of Accounting Literature*, 19–35.
- Novitasari, D. R., & Prabowo, T. J. W. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Kasus

- pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1–8.
- Nwankwo, J. I., & Emunemu, B. O. (2014). *Handbook on Research in Education and the Social Sciences*. Ibadan: Giraffe Books.
- Otalor, J. I., & Oti, P. A. (2020). Budgetary Governance and Sustainable Development in Nigeria. *International Journal of Entrepreneurship*, 24(1), 1–21. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/budgetary-governance-sustainable-development/docview/2425599007/se-2?accountid=62100>
- Oyebanji, O. J. A. (2017). Research Variables: Types, Uses, and Definition of Terms. In *Research in Education* (pp. 43–54). His Lineage Publishing House.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Parwanto, D. (2021). *IPM DIY 2020 Tertinggi Kedua se-Indonesia*. Diakses pada 25 Oktober 2021, dari https://rri.co.id/yogyakarta/565-sosial/957144/ipm-diy-2020-tertinggi-kedua-se-indonesia?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General Campaign
- Purbadharmaja, I. B. P., Maryunani, I. B. P., Ananda, C. F., & Santoso, D. B. (2019). The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare. *Foresight*, 21(2), 227–249. <https://doi.org/10.1108/FS-05-2018-0052>
- Raisová, M., & Júlia, Ā. (2014). Emerging Markets Queries in Finance And Business Economic growth-supply and demand perspective. *Procedia Economics and Finance*, 15(14), 184–191. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00476-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00476-6)
- Rakhman, F. (2019). Budget implementation in a risky environment: evidence from the Indonesian public sector. *Asian Review of Accounting*, 27(2), 162–176. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2018-0020>
- Rigdon, E. E. (2013). Partial Least Squares Path Modeling. In *Structural Equation Modeling. A Second Course* (2nd ed., pp. 81–116). Charlotte NC: Information Age Publishing.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1), 14–33. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/view/363/347>
- Santoso, Y. I. (2021). *Ekonomi 2020 masih terpusat di Pulau Jawa, ini kata ekonom CORE*. Diakses pada 24 Oktober 2021, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-2020-masih-terpusat-di-pulau-jawa-ini-kata-ekonom-core>

- Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J.-H., Becker, J.-M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Sarstedt, M., & Mooi, E. A. (2019). *A Concise Guide to Market Research: The Process, Data, and Methods Using IBM SPSS Statistics*. Springer.
- Scott, J., & Marshall, G. (2009). *A Dictionary of Sociology* (3rd ed.). USA: Oxford University Press.
- Setkab. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020; BPS: Meski Lambat, Ada Pergeseran Penduduk Antarpulau*. Diakses pada 23 Oktober 2021, dari <https://setkab.go.id/hasil-sensus-penduduk-2020-bps-meski-lambat-ada-pergeseran-penduduk-antarpulau/>
- Sino, S., Ruliana, T., & Latif, I. N. (2016). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. *Ekonomia*, 5(1), 432–438.
- Siregar, H. A. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Dana Alokasi Umum terhadap Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru dengan Pertumbuhan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi. *Kurs*, 2(1), 1–13.
- Sofilda, E., Nurhayati, & Hamzah, M. Z. (2015). Government Spending Contributions on per Capita Income and its Effect toward the Human Development Index (Comparative Study between Western Indonesia and Central & East Indonesia). *Journal of Social and Development Sciences*, 6(3), 43–49. <https://doi.org/10.22610/jsds.v6i3.851>
- Suranta, S., Perdana, H. D., & Syafiqurrahman, M. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 111–124. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.284>
- Wulandari, E., Wahyudi, M., & Rani, U. (2018). Effect of Original Local Government Revenues, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Share Funds, Other Legal Revenues, Budget Surplus/Deficit to Human Development Index Through Capital Expenditures: Case Study of Regencies/Municipalities in. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(2), 125–137.



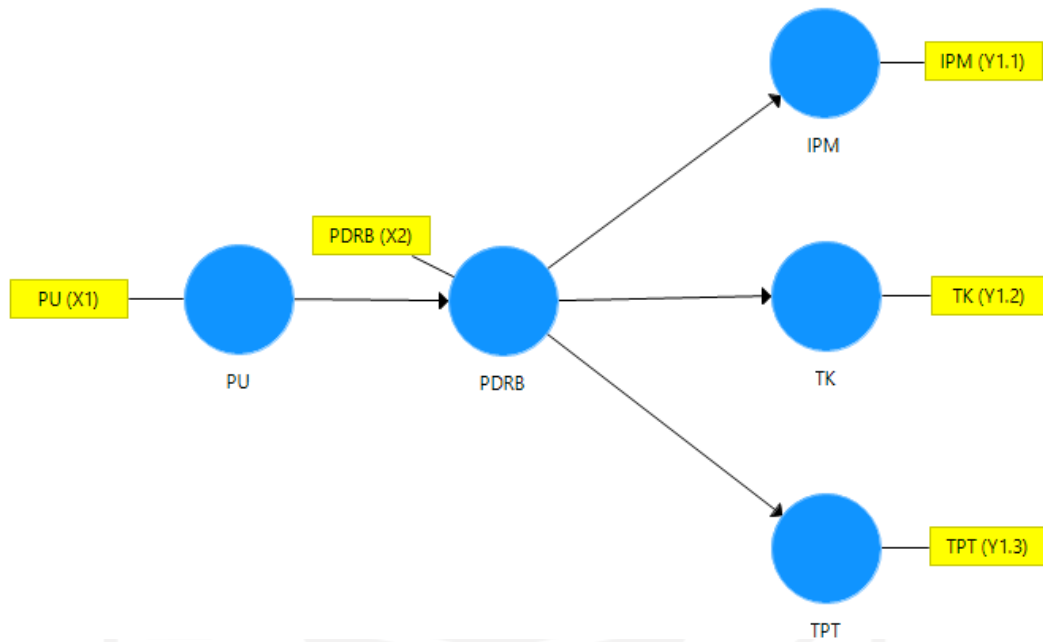
LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

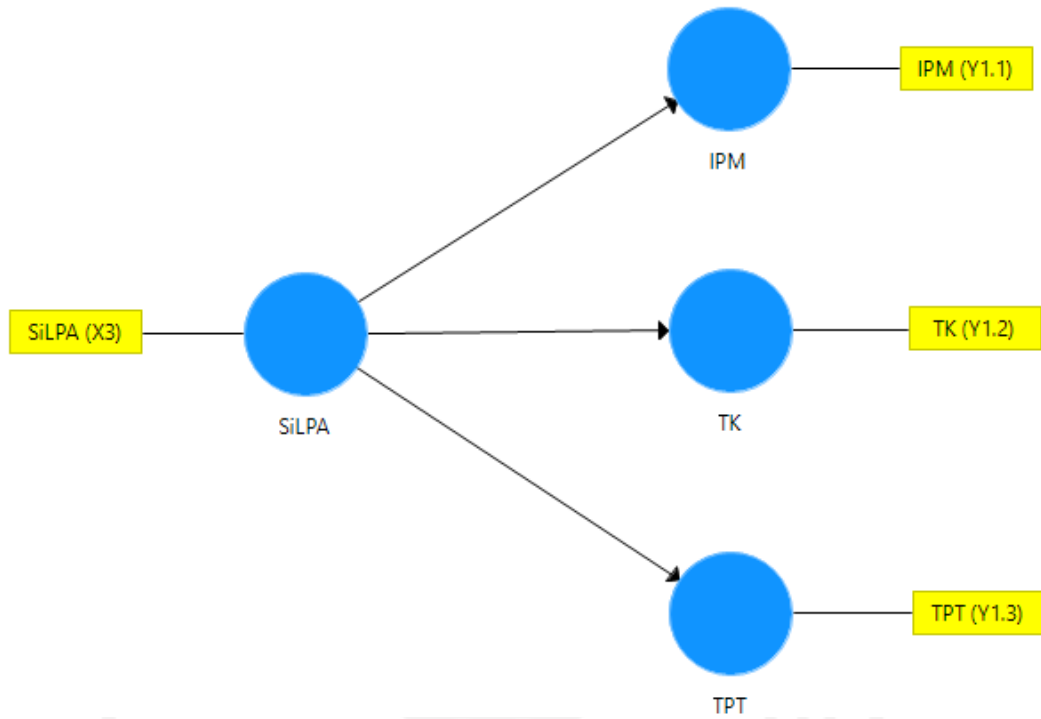
Data Indikator Variabel Penelitian

Kab/Kota DIY	Tahun	PU	PDRB	SiLPA	DES	PAD	IPM	TK	TPT
Bantul	2016	92,85	16375,51	176,87	20,22	115,73	78,42	14,55	2,72
	2017	41,22	17209,87	275,52	23,68	133,84	78,67	14,07	3,12
	2018	44,55	18150,88	147,79	20,77	110,12	79,45	13,43	2,72
	2019	103,61	19155,27	106,34	22,29	112,72	80,01	12,92	3,06
	2020	10,37	18838,13	141,37	22,79	102,09	80,01	13,50	4,06
Gunungkidul	2016	2,00	11696,16	525,28	12,47	119,68	67,82	19,34	2,72
	2017	96,61	12281,56	641,87	14,69	141,06	68,73	18,65	1,65
	2018	97,50	12914,94	158,09	12,26	108,74	69,24	17,12	2,07
	2019	88,81	13605,07	95,80	12,06	111,60	69,96	16,61	1,92
	2020	133,62	13513,23	96,96	12,73	92,81	69,98	17,07	2,16
Kulon Progo	2016	101,33	6580,68	785,16	13,27	104,55	72,38	20,30	2,72
	2017	93,86	6973,41	155,52	17,52	112,87	73,23	20,03	1,99
	2018	97,06	7728,41	415,77	13,53	101,92	73,76	18,30	1,49
	2019	109,82	8770,75	203,78	14,22	105,17	74,44	17,39	1,80
	2020	54,16	8414,75	331,06	16,08	102,62	74,46	18,01	3,71
Sleman	2016	105,99	29563,38	309,77	30,79	116,72	82,15	8,21	2,72
	2017	258,94	31140,59	192,73	31,57	118,16	82,85	8,13	3,51
	2018	84,42	33138,26	263,60	32,96	117,28	83,42	7,65	4,40
	2019	98,71	35286,51	233,93	34,22	112,03	83,85	7,41	3,93
	2020	195,97	33906,37	210,10	31,02	83,46	83,84	8,12	5,09
Yogyakarta	2016	87,43	23536,29	80,00	34,26	107,35	85,32	7,70	2,72
	2017	471,59	24768,43	84,75	39,60	128,55	85,49	7,64	5,08
	2018	203,09	26127,22	370,02	38,43	121,03	86,11	6,98	6,22
	2019	160,55	27685,29	145,71	39,02	108,33	86,65	6,84	4,80
	2020	38,75	27015,49	143,24	33,13	83,83	86,65	7,27	9,16

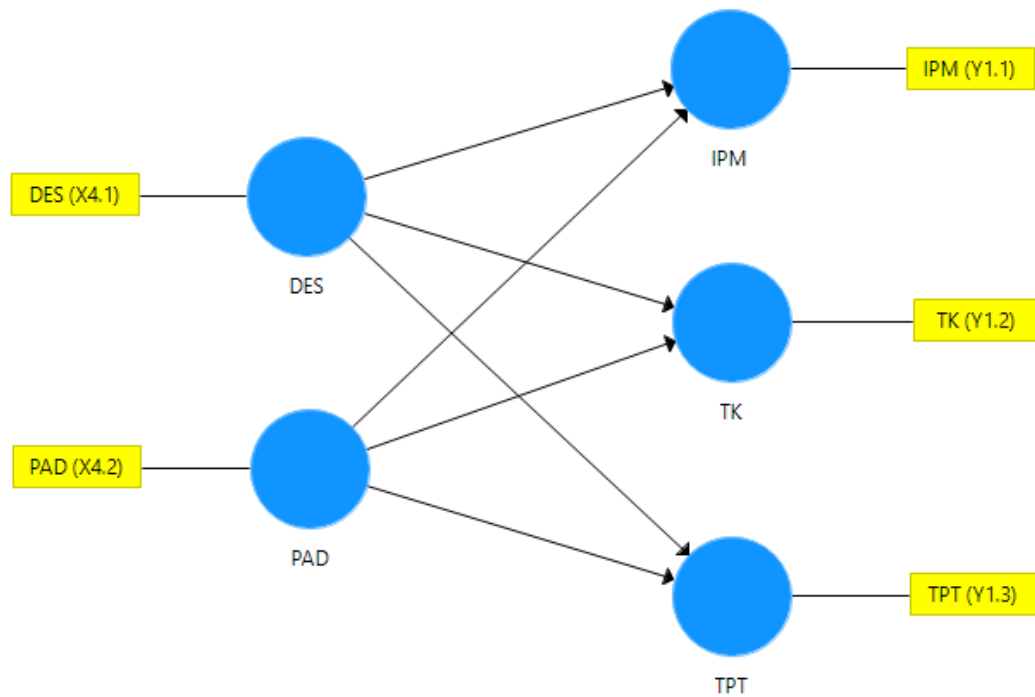
LAMPIRAN 2

Path Diagram Hipotesis Pertama dan Kedua

LAMPIRAN 3

Path Diagram Hipotesis Ketiga

LAMPIRAN 4

Path Diagram Hipotesis Keempat

LAMPIRAN 5

Hasil Penelitian

Lampiran 5.1 Hasil Statistik Deskriptif

<i>Indicators</i>	<i>Missing</i>	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>Excess Kurtosis</i>
PU	0	114,912	97,06	2,00	471,59	92,353	8,187
PDRB	0	19.375,058	18.150,88	6.580,68	35.286,51	9.022,932	-1,242
SiLPA	0	251,641	192,73	80,00	785,16	175,167	2,599
DES	0	23,743	22,29	12,06	39,60	9,556	-1,508
PAD	0	110,890	111,60	83,46	141,06	12,999	0,827
IPM	0	78,276	79,45	67,82	86,65	6,214	-1,389
TK	0	13,090	13,50	6,84	20,30	4,866	-1,713
TPT	0	3,422	2,72	1,49	9,16	1,677	4,151

Lampiran 5.2 Path Coefficients H1 dan H2

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
PDRB -> IPM	0,828	0,834	0,020	40,695	0,000
PDRB -> TK	-0,946	-0,948	0,013	71,607	0,000
PDRB -> TPT	0,606	0,633	0,089	6,778	0,000
PU -> PDRB	0,345	0,362	0,118	2,929	0,004
PU → PDRB → TPT	0,209	0,231	0,087	2,392	0,017
PU → PDRB → IPM	0,286	0,302	0,099	2,887	0,004
PU → PDRB → TK	-0,326	-0,343	0,112	2,910	0,004

Lampiran 5.3 Path Coefficients H3

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
SiLPA -> IPM	-0,398	-0,390	0,174	2,296	0,022
SiLPA -> TK	0,426	0,410	0,167	2,547	0,011
SiLPA -> TPT	-0,189	-0,183	0,147	1,281	0,201

Lampiran 5.4 Path Coefficients H4

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
PAD -> IPM	-0,161	-0,156	0,058	2,793	0,005
PAD -> TK	0,108	0,106	0,038	2,877	0,004
PAD -> TPT	-0,343	-0,309	0,158	2,172	0,030
DES -> IPM	0,960	0,957	0,035	27,441	0,000
DES -> TK	-0,961	-0,962	0,025	38,857	0,000
DES -> TPT	0,722	0,740	0,114	6,350	0,000

